

**KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT
DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Oleh

SAIFUL ANSARI
NIM. 150 211 0459

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H/2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA
ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : SAIFUL ANSARI

NIM : 150 211 0459

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 19 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sabian Utsman, Drs. S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004



Abdul Khair, M.H.
NIP. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002



Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

HAL: **MOHON DIUJI SKRIPSI**

Palangka Raya, 19 Juni 2019

Sdr. Saiful Ansari

Kepada

YTH. Ketua Panitia Ujian

Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

NAMA: SAIFUL ANSARI

NIM : 1502110459

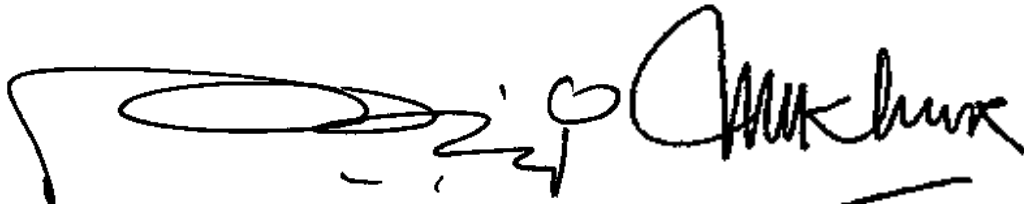
**JUDUL: KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA
ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Abdul Khair, M.H.
NIP. 196812012000031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA** oleh **SAIFUL ANSARI, NIM: 1502110459** telah diujikan oleh **Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya** pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Syawal 1440 H
26 Juni 2019 M

Palangka Raya, 2 Juli 2019

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag.**
Pimpinan Sidang

(.....)

2. **Eka Suriansyah, M.Si.**
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Sabian Utsman, Drs. S.H., M.Si.**
Penguji II

(.....)

4. **Abdul Khair, M.H.**
Sekertaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

(.....)

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Nip. 197704132003121003

KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Profesi advokat merupakan salah satu profesi yang diminati oleh para sarjana hukum. Berpredikat sebagai *officium nobile* menjadikannya sebagai profesi dengan harkat dan martabat yang tinggi. Namun, profesi advokat juga sering menuai pro dan kontra di masyarakat. Asumsi miring selalu diarahkan kepada advokat, seperti “maju tak gentar membela yang bayar”. Hal tersebut akan berdampak pada penggunaan jasa advokat serta menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasanya dalam perkara di persidangan. Berangkat dari hal tersebut, diperlukan upaya penggalan data terkait penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah terkait dengan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya serta implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian: (1) Penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan. Meskipun demikian, jumlah perkara yang tidak menggunakan jasa advokat juga lebih besar dibandingkan jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat. Faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya antara lain: (a) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum (b) asumsi masyarakat terhadap besarnya honorarium advokat (c) padatnya aktivitas para pihak. (2) Implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya antara lain: (a) lebih praktis bagi klien dari segi waktu. (b) terhindar dari kesalahan dalam membuat berbagai macam dokumen atau surat yang berkaitan dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya seperti: pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun hal lain yang diinginkan oleh klien dalam petitumnya. (c) klien dapat memahami hak-haknya dikarenakan advokat akan menjelaskan hak-hak klien sehingga klien menjadi teredukasi dan lebih mengerti hak-haknya. (d) mempermudah hakim dalam sesi tanya jawab sehingga dapat melancarkan proses persidangan. (e) dapat mempermudah panitera dalam hal mengurus administrasi serta prosedur perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (f) mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.

Kata kunci: Penggunaan, Advokat, Pengadilan Agama.

THE TENDENCY TO USE ADVOCATE SERVICES IN RELIGIOUS COURT OF PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

An advocates profession is one of the professions that are in demand by law graduates. Predicate as *officium nobile* makes it a profession with high dignity. However, the advocate profession also often reaps the pros and cons in society. Angled assumptions are always directed to advocates, such as “advancing fearlessly defending the payer.” This will have an impact on the use of advocates services and is a consideration for the community in using their services in litigation at the trial. Departing from this, data collection efforts are needed related to the use of advocate services in litigation in the court, especially the Religious Court of Palangka Raya city. The formulation of problem this study is related to use of advocate service in the religious court of palangka raya city and the implications of using advocate service in religious court of palangka raya city.

This research is a descriptive field research. The approach used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and document review.

The result of the study: (1) the use of advocate services in Religious Court of Palangka Raya city from 2016-2018 always increases. However, the number of cases that do not use advocate services is also greater than the number of cases using advocate services. Factor that influence the use of advocate services at the Religious Court of Palangka Raya city include: (a) lack of community understanding of law (b) community assumptions on the amount of advocate honorarium (c) solid activity of parties. (2) the implications of using advocate services at the Religious Court of Palangka Raya city include: (a) more practical for clients in terms of time. (b) avoid mistakes in making various kinds of documents or letters relating to the procedure of proceedings in the religious court of palangka raya city such as: making claims, answers, replicating, duplicating, or other things desired by the client in his petitum. (c) clients can understand their rights because advocates will explain the rights of clients so that clients become educated and better understand their rights. (d) facilitate the judge in the question and answer session so that he can launch the trial process. (e) can make it easier for the clerks in managing administration and litigation procedures in the Religious Court of Palangka Raya city. (f) representing parties who cannot attend the follow-up proceedings, thereby facilitating the trial process.

Keywords: Use, Advocate, Religious Court.

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA”** ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Rusmilawati dan Ayahanda Zainal Arifin serta Kakanda Ahmad Kamarudin dan seluruh keluarga yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Ibu Norwili, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs, S.H, M.Si., selaku Pembimbing I beserta Bapak Abdul Khair, M.H., selaku pembimbing II, semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
9. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, peneliti

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.

10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, 19 Juni 2019

Peneliti

SAIFUL ANSARI
NIM. 1502110459

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUL ANSARI

NIM : 150 211 0459

Tempat, Tanggal Lahir : Cempaka Mulia Barat, 07 April 1997.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya”** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Juni 2019




SAIFUL ANSARI
NIM. 150 211 0459

MOTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang membekali dengan ilmu pengetahuan

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberi hamba keimanan, kekuatan, dan kesabaran.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada imam-ku dunia dan akhirat, Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku cintai.

Zainal Arifin dan Rusmilawati

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang. Maaf, jika selama ini anakmu belum bisa menggores senyum di wajahmu. Tak kan bisa ku balas setiap tetes peluh keringatmu hanya dengan selembar kertas dalam persembahan ini. Semoga di lain waktu bisa melukis senyum di wajahmu, mengukir bangga di hatimu. Sebutlah namaku selalu dalam setiap bait do'a mu.

Ahmad Kamaruddin

Teruntuk kakak tercinta, ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah menjaga, mengasihi, menyayangi dan mencintaiku sepenuh hati. Engkau adalah panutan ku, pelindung ku, pahlawan ku.

Seluruh Keluarga Besar HKI'15

Berakhirnya masa studi ini tidak akan merubah pertemanan, persahabatan, kekeluargaan yang telah dirajut selama ini. Selalu berbekas dalam sanubari setiap kenangan, suka dan duka yang kita lewati. Kita adalah keluarga, tak akan pernah putus walau termakan masa. Sukses untuk kita.

Seluruh Civitas Akademik IAIN Palangka Raya

Terimakasih atas ilmu, nasehat, didikan, ajaran yang diberikan selama ini. Semoga selalu mentaati dan menjalankan segala petuahmu. Setinggi apapun pangkat dan jabatan ku nanti, tak akan merubah status murid dalam diri ini. Terimakasih duhai Guru. Semoga Allah membalas jasmamu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Konsep.....	18
1. Definisi Advokat.....	18
2. Dasar Hukum Advokat	19
3. Tugas dan Fungsi Advokat	21
C. Kerangka Teori	23
1. Teori Eksistensi.....	23
2. Teori Efektivitas Hukum	25
3. Teori <i>Maṣlahah</i>	26
4. Teori Perlindungan Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
1. Subjek Penelitian	35
2. Objek Penelitian.....	37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
1. Waktu Penelitian.....	37

2. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Pengumpulan Data	43
1. Wawancara.....	45
2. Dokumentasi	47
3. Observasi	48
F. Pengabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Kerangka Pikir	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	53
B. Laporan Hasil Penelitian.....	60
C. Penggunaan Jasa Advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya	69
1. Eksistensi Profesi Advokat di Kota Palangka Raya	69
2. Jumlah Pengguna Advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya ..	74
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Advokat.....	83
D. Implikasi Penggunaan Advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya..	97
1. Ditinjau dari Teori <i>Maṣlahah</i>	97
2. Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum	121
BAB V PENUTUP.....	124

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127



DAFTAR SINGKATAN

APSI	: Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
DPC PERADI	: Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia
h	: halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Het Herziene Indonesisch</i>
H.R.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
JAMKESMAS	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jl.	: jalan
KAI	: Kongres Advokat Indonesia
KKM	: Kartu Keluarga Miskin
KMA	: Keputusan Mahkamah Agung
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
No.	: nomor
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PKPA	: Pendidikan Khusus Profesi Advokat
PPKHI	: Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia
POSBAKUM	: Posko Bantuan Hukum
PTP2A	: Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
SWT	: Subhanahu wa ta'ala

SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: undang-undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
UPA	: Ujian Profesi Advokat



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian.....	16
Tabel 2 Alasan peneliti memilih Subjek dan Informan dalam penelitian.....	36
Tabel 3 Matrik Kegiatan Penelitian	39
Tabel 4 Sumber Data Penelitian.....	42
Tabel 5 Kerangka Pikir	53
Tabel 6 Data Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ...	77
Tabel 7 Data Pengguna Bantuan Hukum di LBH Sahabat Hukum	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Berfoto bersama Subjek penelitian usai wawancara **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2 Wawancara bersama Advokat kota Palangka Raya **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3 Berfoto bersama Advokat Palangka Raya usai wawancara **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 6 Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 7 Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 8 Wawancara bersama Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya **Error! Bookmark not defined.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’.....	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba
ذُكِرَ : zukira

يَذْهَبُ : yazhabu
سُئِلَ : su'ila

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اِ--اِوْ--	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ--يِ--	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ--وِ--	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhommah transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
: rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
: al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
الْبِرِّ : al-birr
نَزَّلَ : nazzala
الْحَجِّ : al-ḥajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

الْقَلَمُ: al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ: umirtu

أَكَلَ: akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ: ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ: ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

سَيِّءٌ: syai'un
nau'un

النَّوْءُ: an-

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
: fa aufūl-kaila wal-mīzāna

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa prospek kerja yang bisa dijadikan sebagai peluang bagi lulusan sarjana hukum, diantaranya menjadi seorang advokat. Untuk bisa menjadi seorang advokat haruslah melalui proses yang panjang. Ada beberapa syarat dan tahapan jika ingin menjadi seorang advokat, diantaranya: berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum (fakultas hukum, syari'ah, militer, dan ilmu kepolisian), mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), mengikuti ujian profesi advokat (UPA), magang di kantor advokat selama dua tahun, dan tahapan terakhir adalah pengambilan sumpah advokat.

Agustin Teras Narang seorang advokat kenamaan asal Kalimantan Tengah juga turut memberikan pendapatnya terkait idealnya seorang advokat. Menurutnya, menjadi seorang pengacara harus melalui suatu proses. Seorang sarjana hukum, mustahil langsung menjadi advokat. Sebab selama kuliah, umumnya mahasiswa hanya disuguhi oleh pengetahuan teoritis hukum. Sedangkan jika sudah menjadi advokat maka akan berhadapan langsung dengan beragam kasus yang notabenenya tidak sesederhana hal-hal yang teoritis tersebut. Oleh karena itu, seorang pengacara sepantasnya harus menguasai hukum secara teoritis dan mampu mengaplikasikannya secara praktis.

Untuk itulah perlu persiapan yang mantap sebelum terjun menjadi pengacara.¹

Dewasa ini keberadaan advokat, sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleks masalah hukum. Dalam kondisi demikian, jasa advokat menjadi bagian yang urgen demi semakin berkembangnya peradaban dan persaingan hidup yang semakin ketat dan kompleks sehingga aspirasi yuridis klien dapat terartikulasikan.² Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi advis hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien.

Profesi advokat sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia. Kehadirannya sangatlah penting dalam upaya penegakkan supremasi hukum. Dewasa ini, profesi advokat sudah berkembang pesat. Setiap sudut wilayah di Indonesia pasti terdapat seorang advokat. Umumnya, alasan seseorang memilih untuk berkecimpung di dunia advokat dikarenakan profesinya yang sangat mulia. Setidaknya hingga akhir tahun 2017 telah tercatat ada sebanyak 45.000 Advokat di seluruh Indonesia. Sebanyak 25.000 orang di antaranya adalah advokat yang berusia 25-36 tahun. Atas fakta itu, akan ada 25.000 potensi

139. ¹ Sintong Silaban, *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h.

² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011, h. 274-276.

inovasi yang akan menjawab tantangan perkembangan dunia hukum ke depannya, serta memiliki 25.000 potensi untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih baik di Indonesia.³

Setiap advokat memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴ Kehadiran seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum bagi klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan Pengadilan Agama maupun di masyarakat.

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas

³ Adam Prawira, <https://nasional.sindonews.com/read/1312137/13/bentuk-advokat-muda-peradi-pacu-kualitas-penegakan-hukum-1528284488> diakses pada hari Rabu, 13 Februari 2019. Jam 13:39 WIB.

⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 210.

kepribadian yang dimilikinya. Terkait predikat *officium nobile* yang disematkan kepada advokat, lantas bagaimana tingkat penggunaan jasa advokat di masyarakat untuk menggunakan jasanya dalam berperkara di Pengadilan Agama, khususnya di kota Palangka Raya. Mengingat profesi advokat tidak terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di masyarakat. Walaupun penyimpangan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang yang berprofesi advokat tetapi imbasnya di masyarakat sangat kuat. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartati⁵ berpendapat, bahwa pelaku penyimpangan dalam profesi ini bukan sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam praktiknya di tengah masyarakat. Di media massa seringkali kita disuguhkan ulah para advokat yang terkesan membantu oknum-oknum yang bersalah lepas dari jeratan hukum hingga melakukan penyuapan terhadap hakim-hakim di pengadilan.

Jika mendengar kata advokat, hal pertama yang ada dibenak seseorang ialah tentang mahalanya tarif untuk memakai jasa advokat. Hal yang wajar karena belum adanya standarisasi baku tentang penetapan tarif advokat. Pada umumnya masyarakat cenderung ragu menggunakan jasa advokat. Kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di pengadilan agama

⁵ Rahmat Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 18.

bukan tanpa alasan. Menurut Abdullah Gofar⁶, harus diakui bahwa advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di negara maju pun terdapat beragam masalah. Ironisnya, advokat juga mendapatkan predikat sebagai profesi yang tidak disukai, karena dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Ukuran profesionalitas seorang advokat bukan dilihat dari seberapa besar tarifnya, seberapa mewah penampilannya, seberapa tinggi pendidikannya. Akan tetapi, seorang advokat dikatakan profesional apabila ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya seperti melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas dan tepat waktu serta melaksanakan tugas-tugas keadvokatan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus bertanggung jawab kepada Tuhan, Negara, Peradilan, masyarakat, klien, serta pihak lawannya. Advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai *agent of service*, yakni pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien. Disamping itu hubungan antara teman sejawat advokat atau pihak lawan harus dilandasi saling menghormati,

⁶ Abdullah Gofar, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*, Artikel dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 61 Tahun XIV Edisi Mei-Juni 2003, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2003, h. 13.

menghargai dan mempercayai. Selain advokat itu mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan di atas, advokat juga berkedudukan sebagai pengawal konstitusi, pembela hak asasi manusia, dan profesi yang paling dekat dengan masyarakat. Maka, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Oleh sebab itu, penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini sangat menarik untuk diteliti, sebab permasalahan tersebut dianggap perlu untuk diteliti lebih dalam guna mengetahui antusias masyarakat terhadap penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selain itu, faktor yang bisa mempengaruhi penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya juga penting untuk diketahui. Jika terdapat masyarakat yang menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, maka implikasi atau manfaat yang diperoleh ketika menggunakan jasa advokat tersebut juga penting untuk diketahui. Mengingat profesi advokat di kota Palangka Raya saat ini sudah banyak peminatnya. Sangat disayangkan jika perkembangan profesi advokat yang semakin pesat tidak diimbangi dengan antusias penggunaan jasa advokat bagi masyarakat. Dengan demikian, peneliti merasa berkepentingan untuk meneliti hal tersebut. Peneliti akan

berupaya mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis masalah tersebut dalam bahasan penelitian skripsi dengan judul, **“KECENDERUNGAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?
2. Bagaimana implikasi penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
2. Implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai profesi advokat yang menangani perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
- b. Dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian pemikiran hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyaria'ahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 (satu) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam rangka upaya mengetahui kecenderungan

penggunaan jasa advokat serta implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya tulis dapat dikatakan ilmiah adalah penulisannya yang sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang berisi hal-hal pokok untuk dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian konsep dan kerangka teori.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian yaitu memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya

yakni jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, dan kerangka pikir.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Palangka Raya, dan laporan hasil penelitian serta menjelaskan tentang kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

BAB V. PENUTUP

Sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan, maka pada bab ini akan memuat kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang keadvokatan. Namun, untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. M. Johan Kurniawan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁷

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Sedangkan

⁷ M. Johan Kurniawan, *Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, h. 1.

pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam memberikan kuasa atau wakil kepada advokat dibolehkan. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu para penegak keadilan hendaknya menyelesaikan perkara dengan subjektif mungkin agar tercapainya prinsip keadilan sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam.

2. Ahmad Fathoni, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.⁸

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung serta Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan etika profesi yang dilakukan advokat dalam penyelesain sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Sedangkan ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya penelitian ini

⁸ Ahmad Fathoni, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, SKRIPSI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015, h. 1.

merupakan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa:

Keberadaan advokat dalam membantu penyelesaian perceraian sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedikit banyaknya tidak mengetahui tentang tata cara berperkara di pengadilan dalam mencari keadilan. Seorang advokat dalam membantu penyelesaian sengketa baik di bidang perceraian maupun lainnya harus menasehati terdahulu untuk selalu melakukan perdamaian walaupun itu sebagai jalan terakhir. Akibat hukum dari penyalahgunaan etika profesi advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah akan dikenakan sanksi baik secara ringan atau teguran maupun sanksi pemecatan dari anggota organisasi advokat yang manaunginya apabila seorang advokat melanggar kode etik advokat. Apabila seorang advokat benar melakukan manipulasi data dalam proses persidangan maka advokat tersebut dapat tuntutan tindak pidana bagi klien yang merasa dirugikan. Kemudian Advokat harus berperilaku sesuai dengan kode etik advokat diantaranya: *Pertama*, Mendahulukan kepentingan kliennya dari pada kepentingan pribadinya demi tercapainya keadilan. *Kedua*, Tidak menelantarkan kliennya dalam proses persidangan. *Ketiga*, Berperilaku sopan dimuka persidangan. *Keempat*, Advokat tidak memasang tarif yang sangat mahal dan tidak melihat kondisi kliennya apakah klien itu golongan ekonomi kebawah atau keatas sebagai tolak ukur dalam menetapkan honorarium. *Kelima*, Apabila seorang advokat melanggar kode etik advokat maka seorang advokat itu akan dikenakan sanksi baik secara ringan atau teguran maupun sanksi yang pemecatan dari anggota organisasi advokat yang manaunginya. *Keenam*, Apabila seorang advokat benar melakukan manipulasi data dalam proses persidangan maka advokat tersebut dapat tuntutan tindak pidana bagi klien yang merasa dirugikan. *Ketujuh*, Advokat non muslim boleh membantu penyelesaian sengketa perceraian seorang yang beragama Islam, apabila advokat tersebut mengetahui tata cara beracara di Pengadilan Agama. Dan ketika waktu ikrar talak dapat disubstitusikan atau diwakilkan kepada teman advokat lainnya yang beragama Islam. Sama seperti advokat wanita yang menangani kasus perceraian seorang laki-laki. Ikrar talak dapat disubstitusikan kepada advokat laki-laki.

3. Sadewo Usodo, *Perbandingan Madzhab dan Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana tinjauan hukum positif dan Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana dan bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hal pendampingan klien pada perkara pidana ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitik*. Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

Advokat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum. Penasihat hukum dalam pandangan Islam juga berperan mendampingi klien mulai di tingkat awal. Istilah *Wakalah* merupakan pengertian advokat dalam Islam. Bantuan hukum dalam Islam bisa berupa nasehat, pertimbangan, saran, masukan, serta dorongan semangat dalam menghadapi permasalahan. Dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memberikan bantuan hukum secara individu dan pembela umum, karena sesungguhnya bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Selain itu advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hukum Islam mengacu pada al-Qur'an dan Hadits, sedangkan

⁹ Sadewo Usodo, *Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, h. 1.

dalam hukum Positif mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KUHP dan KUHPA.

4. Jefry Tarantang, Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya¹⁰

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Apa landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dan Bagaimana konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam?. Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga terdiri dari beberapa landasan, yaitu: landasan Alquran dan hadis; landasan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sumber hukum Pancasila dan UUD 1945(*recht idee*), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis menciptakan kemaslahatan keluarga melalui *islah* (perdamaian); landasan teoritis, yang terdiri dari konstruksi mental yaitu amanah yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil, dan konstruksi intelektual yaitu profesional meliputi keahlian di bidang hukum keluarga Islam; landasan yuridis yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan

¹⁰ Jefry Tarantang, *Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, TESIS, Pascasarjana Magister Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2017, h. 1.

(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002; dan landasan sosiologis yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan. Sedangkan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan dengan pengembangan prinsip perdamaian, prinsip amanat dan adil, prinsip advokasi, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah, dalam rangka mengembalikan hubungan keluarga dengan mengutamakan jalan damai.

Untuk mengetahui posisi dan kedudukan penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan serta kedudukan penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1.	M. Johan Kurniawan, <i>Eksistensi dan wewenang advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam</i> , 2011, Penelitian Pustaka.	Eksistensi Profesi Advokat	Eksistensi dan Wewenang Advokat ditinjau dalam Hukum Islam	Penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota
2.	Ahmad Fathoni, <i>Peran Advokat Dalam Penyelesaian</i>	Peran Advokat	Peran advokat dalam penyelesain sengketa	

	<i>Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, 2015, Penelitian Kualitatif.</i>		perceraian	Palangka Raya
3.	Sadewo Usodo, “ <i>Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif</i> ”, 2012, Penelitian Pustaka.	Peran Advokat	Peran advokat dalam komparasi hukum Islam dan hukum positif	
4.	Jefry Tarantang, <i>Menggali Etika Advokat dalam Al-Qur'an</i> , Penelitian Pustaka.	Profesi Advokat	Etika Profesi Advokat dalam al-Qur'an	
5.	Jefry Tarantang, <i>Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam</i> , 2017, Penelitian Pustaka.	Profesi Advokat	Etika Profesi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam	

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas, belum ada kajian ataupun penelitian yang secara khusus mengkaji tentang kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dan meneliti lebih dalam tentang implikasi penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Sehingga sangat relevan bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut.

B. Kajian Konsep

1. Definisi Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di Pengadilan.¹¹ Sedangkan menurut kamus hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang, berwenang sebagai penasihat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.¹²

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 10.

¹² Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada pasal 1 (a) menyatakan bahwa:

Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.¹³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa jasa hukum dari seorang advokat mencakup:

Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak paham hukum. Pemberian nasehat, tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan. Bimbingan. Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.¹⁴

2. Dasar Hukum Advokat

a) Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif

Adapun dasar hukum advokat yang berlaku di Indonesia saat ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;

¹³ Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

¹⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 4.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22;
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) *Het Herziene Indonesisch (HIR)*.¹⁵
- b) Dasar Hukum Advokat dalam Islam

Al-qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam al-Qur'an sama halnya dengan pemerintah. advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi.¹⁶ Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari al-Qur'an, di antaranya:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥¹⁷

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak

¹⁵ Didi Kusrandi, *Bantuan Hukum...*, h. 43.

¹⁶ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 67.

¹⁷ An-Nisā [4]: 105.

bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥¹⁹

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨²¹

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

3. Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang diwajibkan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004, h. 95.

¹⁹ An-Nisā [4]: 135

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

²¹ Al-Maidah [5]: 8

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

masyarakat atau klien. Oleh karena itu, advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, dan klien. Dalam menjalankan tugasnya, advokat juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- g. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- h. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
- i. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasihat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat

hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).

- j. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
- k. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*).²³

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁴

C. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.²⁵ Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* (*eks*= keluar,

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

²⁴ Jefry Tarantang, *Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, THESIS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2017, h. 100.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2008, h. 357

sistere= ada atau berada). Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri.²⁶ Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *eksistere*, yang artinya keluar dari melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mangaktualisasikan potensi-potensinya.

Menurut Save M. Dagun, konsep eksistensi dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting dan terutama adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya.²⁷ Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis tetapi senantiasa menjadi. Artinya, manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah, bila kini sebagai suatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak berani berbuat, maka kita tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya

²⁶ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 33

²⁷ *Ibid.*

2. Teori Efektivitas Hukum

Suatu kaidah hukum akan menjadi efektif jika dipahami sebagai komando, Menurut John Austin dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determind*, yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar, hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (*laws are commands*). Hukum selalu berwatak komando yang berlaku dimasyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, *the supreme political authority* atau pemilik otoritas politik yang paling tinggi (*sovereign* dalam pandangan Austin)²⁸

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas

²⁸ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 28.

pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*).²⁹

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

3. Teori *Maṣlahah*

Secara etimologis, arti *maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan kata *mafsadah* yang artinya kerusakan. Menurut Imam al-Ghazālī pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).³⁰ Menurut at-Tūfī, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang

²⁹ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, 2013, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 357.

³⁰ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XVIII, No. 1 Januari 2013, h. 100.

dalam arti *syara'*, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *syara'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *maṣlahah* masuk dalam cakupan *maqāsid al-syarī'ah*.³¹

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:³²

1) *Maṣlahah ḍaruriyyah*

Maṣlahah ḍaruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah ḍaruriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.

2) *Maṣlahah ḥajiyyah*

Maṣlahah ḥajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya. Dengan kata lain, *maṣlahah ḥajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang

³¹ Imron Rosyadi, *Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan*, SUHUF, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

³² Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 98-100.

dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *daruriyyah*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

3) *Maṣlahah taḥsiniyyah*

Maṣlahah taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

b. Dari segi pandangan *syara'*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung yang

memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.³³

2) *Maṣlaḥah mulghah*

Maṣlaḥah mulghah ialah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* untuk menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun *syara'* ternyata menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.³⁴

3) *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *syara'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.³⁵

c. Syarat-syarat *maṣlaḥah* ³⁶

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 351.

³⁴ *Ibid.*, h. 353.

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 141-142.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 64.

- 1) Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu haruslah berupa *masalahah* yang hakiki, yaitu benar-benar mendatangkan manfaat serta dapat menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW atau bertentangan dengan *ijma'*.

Dari beberapa pendapat para 'ulama diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Maṣlaḥah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadah* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia atau akhirat;
- b. *Maṣlaḥah* harus sesuai dengan kehendak *syara'* dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, bukan hanya sesuai dengan akal rasionalitas dan nafsu manusia semata;
- c. *Maṣlaḥah* harus berlaku untuk semua orang.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁸

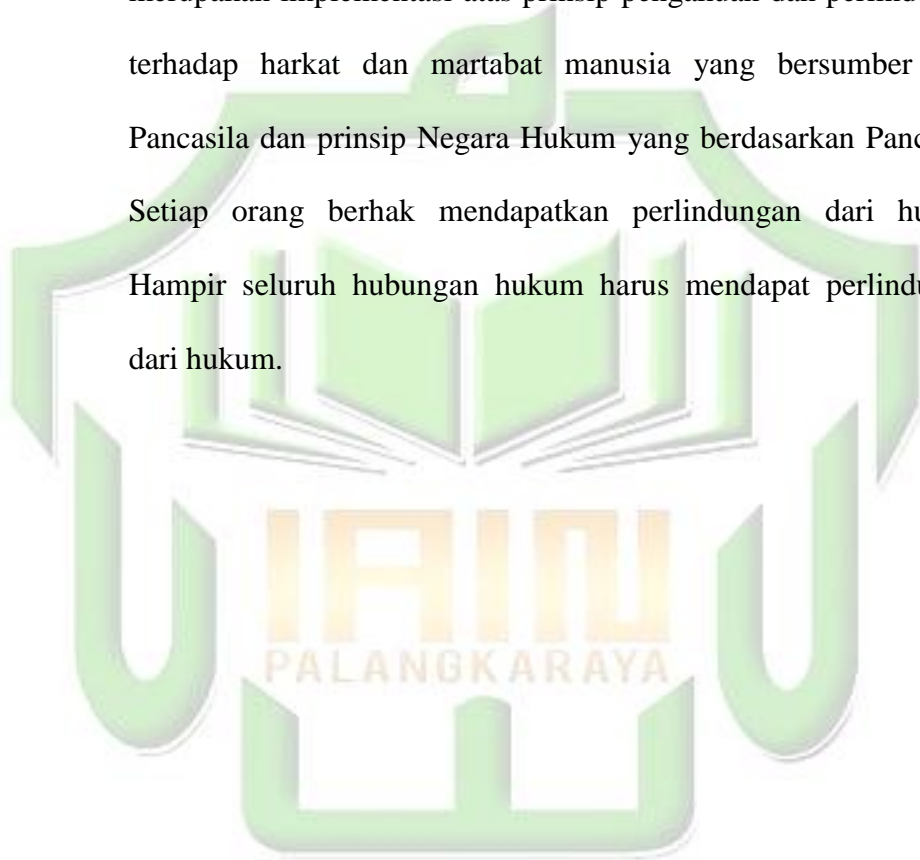
Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Perlindungan hukum merupakan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 55.

³⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. h. 29.

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu berfungsi pula untuk menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sampai saat ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Kajian ini dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa advokat, selain secara yuridis mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Secara sosiologis, advokat merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang³⁹ dengan menggunakan tipe kajian Sosiologi Hukum, oleh sebab itu dianalisis secara kualitatif. Menurut Sabian Utsman dalam buku “*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*”, menjelaskan bahwa:

Sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*) disamping hukum sebagai fakta hukum (*law in the*

³⁹ Sunafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, h. 199.

books) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris.⁴⁰

Sementara fokus penelitian ini adalah kecenderungan penggunaan jasa advokat serta implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk dicari jawabannya. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Menurut Suharsimi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁴¹ Sedangkan menurut Maleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.⁴²

⁴⁰ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 100.

⁴¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 12.

⁴² Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, h. 60.

Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan permasalahan yang memerlukan teknik khusus dalam mengungkapnya, yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan penelitian kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan adanya kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga akan menghasilkan suatu data yang mendalam.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Kemudian ditambah dengan informan-informan guna menggali data terkait dalam permasalahan yang diteliti. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Advokat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
- b. Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
- c. Panitera di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
- d. Petugas Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Adapun alasan peneliti memilih subjek dan informan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Alasan peneliti memilih subjek dan informan dalam penelitian

No.	Subjek dan Informan	Alasan
1.	Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.	Bahwa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka subjek utama dalam penelitian ini adalah para pihak yang menggunakan jasa advokat atau tidak dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
2.	Advokat kota Palangka Raya	Bahwa advokat yang dimaksud adalah advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
3.	Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya	Bahwa Hakim adalah unsur yang terlibat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, selain itu Hakim juga memiliki tugas non yudisial dalam bentuk melayani riset untuk kepentingan ilmiah
4.	Panitera di Pengadilan Agama kota Palangka Raya	Bahwa panitera termasuk unsur yang terlibat dalam proses beracara di persidangan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara persidangan.
5.	Petugas Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya	Bahwa petugas Posbakum dalam perannya adalah untuk membantu masyarakat yang tidak paham hukum serta memberikan pelayanan bantuan hukum berupa menyediakan atau menawarkan jasa advokat kepada pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian ini secara umum adalah kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Adapun objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang di dalamnya menggunakan jasa advokat;
- b. Perkara-perkara yang di dalamnya tidak menggunakan jasa advokat;

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Observasi awal dalam penelitian ini dimulai pada 10 September 2018 dan berakhir pada 11 Juni 2019 dibuktikan dengan surat selesai penelitian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Secara keseluruhan waktu dari penelitian ini adalah 9 bulan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal, peneliti menemui bagian umum Pengadilan Agama kota Palangka Raya untuk menyerahkan surat izin penelitian, kemudian bagian umum memberitahukan bahwa surat akan diproses dalam beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

- b. Tahap kedua, peneliti menemui kepala bagian umum Pengadilan Agama kota Palangka Raya untuk mendapatkan konfirmasi mengenai izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama kota Palangka Raya, peneliti diarahkan untuk menemui Sekretaris Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang kemudian memberikan arahan mengenai subjek dan informan penelitian, sehingga peneliti menetapkan 4 (empat) orang subjek penelitian yang berinisial: SU, HS, BS dan M. Sedangkan informan penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Hakim, Panitera, Posbakum, dan Advokat kota Palangka Raya dengan inisial antara lain: AH, M, DASL, SH, R, KC, dan FA.
- c. Tahap ketiga, peneliti menemui subjek dan informan untuk menetapkan waktu wawancara. Kemudian, subjek dan informan yang telah bersedia dapat diwawancarai secara langsung.
- d. Tahap keempat, setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data, pihak Pengadilan Agama Palangka Raya mengeluarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang perihalnya menyatakan bahwa peneliti telah selesai melakukan penelitian.

Tabel 3 Matrik Kegiatan Penelitian

No.	Hari, Tanggal, dan Tahun	Jam	Agenda
1.	Selasa, 05 Maret 2019	13:30 WIB	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama kota Palangka Raya
2.	Rabu, 13 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 13:50 WIB • 14:00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil surat persetujuan penelitian dari Pengadilan Agama kota Palangka Raya • Wawancara bersama Informan penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
3.	Kamis, 14 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 08:00 WIB • 09:30 WIB • 10:10 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara bersama Informan penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya • Wawancara bersama Informan penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya • Wawancara bersama Informan penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
4.	Selasa, 19 Maret	13:50	Wawancara bersama Informan

	2019	s.d. 14:55 WIB.	penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
5.	Rabu, 20 Maret 2019	19:15 WIB	Wawancara bersama Informan penelitian sekaligus Kepala Lembaga Bantuan Hukum (Sahabat Hukum) kota Palangka Raya
6.	Rabu, 27 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 08:30 WIB • 09:00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan observasi terhadap register surat kuasa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya • Melakukan observasi terhadap jumlah perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
7.	Kamis, 04 April 2019	08:00 WIB	Wawancara bersama subjek penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
8.	Kamis, 11 April 2019	08:00 s.d. 10:00 WIB.	Wawancara bersama subjek penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
9.	Selasa, 11 Juni	08:00	Mengambil surat selesai

	2019	WIB.	penelitian di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
--	------	------	--

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya, Jl. Kapten Piere Tendean, No. 2. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan dalam penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
- b. Pengadilan Agama kota Palangka Raya sebagai tempat diselenggarakannya proses beracara dalam persidangan yang didalamnya terdapat para penegak hukum, salah satunya adalah profesi advokat.
- c. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau

relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.⁴³ Sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier⁴⁴. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4 Sumber data penelitian

Data	No.	Keterangan
Data Primer	1.	Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
Data Sekunder	2.	a. Advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya; b. Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya; c. Panitera Pengadilan Agama kota Palangka Raya d. Petugas Posbakum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
Data Tersier	3.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum. e. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. f. Kamus Hukum

⁴³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, h. 67.

⁴⁴ Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. (lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 30). Data sekunder, yaitu mencakup data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. (lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 392). Data tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber data primer dan data sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan selainnya. (lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 31).

		g. Ensiklopedi Hukum h. Kaidah-kaidah Fiqh
--	--	---

E. Pengumpulan Data

Kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Sugiyono menyebutkan ada empat teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.⁴⁵

Salah satu bagian terpenting yang tak terpisahkan dalam pengumpulan data penelitian adalah pertanyaan penelitian. Sebab, kualitas penelitian salah satunya sangat ditentukan oleh bobot atau kualitas pertanyaan yang diajukan. Hendak dibawa kemana arah penelitian ini sangat bergantung kepada pertanyaan penelitian yang dibuat. Pertanyaan penelitian ini merupakan gerbang utama untuk menggali data terkait rumusan masalah penelitian. Sedangkan wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah kunci untuk membuka gerbang tersebut. Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam menggali data:

1. Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta, 2013, h. 225.

a. Pertanyaan terkait rumusan masalah tentang bagaimana kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya:

- 1) Apakah anda menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- 2) Mengapa anda tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- 3) Apakah faktor yang menjadi kendala untuk tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

b. Pertanyaan terkait rumusan masalah tentang bagaimana implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya:

- 1) Apa manfaat yang anda peroleh ketika menggunakan jasa advokat saat perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

2. Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada informan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pertanyaan terkait rumusan masalah tentang bagaimana kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya:

- 1) Bagaimana kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

- 2) Bagaimana penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya dari tahun 2016-2018?
 - 3) Perkara apa yang sering menggunakan jasa advokat?
 - 4) Menurut anda, apa yang menyebabkan masyarakat menggunakan/tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- b. Pertanyaan terkait rumusan masalah tentang bagaimana implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya:
- 1) Menurut anda, apa manfaat yang didapat ketika menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam menggali data terkait pertanyaan penelitian tersebut diperlukan tiga teknik, yakni wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya,⁴⁶ dokumentasi, dan observasi. Lebih rinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar

⁴⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian...*, h. 107-108.

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi orang secara langsung dengan sumber data. Oleh karena itu, wawancara dapat dijadikan suatu alat pengumpulan data yang efektif.⁴⁷

Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁴⁸ Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan sistem *purposive subject* yaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh subjek tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi

⁴⁷ Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 89.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 157.

dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain.⁴⁹ Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok untuk menggali kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti. Menurut sugiyono, dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁵⁰

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang perkara-perkara yang di dalamnya menggunakan jasa advokat atau tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, Profil Pengadilan Agama Palangka Raya, Prosedur Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Identitas Subjek dan Informan, serta dokumen lain yang dianggap perlu.

⁴⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, h. 88.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 82.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kelebihan dalam penggunaan teknik observasi ini adalah sebagai alat langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala.⁵¹

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya serta mencoba untuk mendeskripsikan terkait implikasi dari penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Moeleong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data

⁵¹ Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2015, Jakarta: Bumi Aksara, h. 76.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵²

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁵³ Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal diatas dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

(1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁴

Adapun teknik pelaksanaannya yaitu:

1. Membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara.
Hasil dokumentasi tentang perkara yang menggunakan jasa Advokat, dibandingkan dengan hasil wawancara sehingga diperoleh keabsahan data;
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing informan atau responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para pihak yang berperkara, advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama Palangka Raya, hakim

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 178.

Pengadilan Agama Palangka Raya, panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terhimpun untuk menambah pemahaman terhadap suatu obyek yang diteliti.⁵⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, mendalam, dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya dapat menghasilkan pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru.⁵⁶

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data, yakni:

1. Pengumpulan Data (*data collection*), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai perkara atau kasus yang menggunakan jasa Advokat dan yang tidak menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

⁵⁵ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial & Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak, 1999, h. 61.

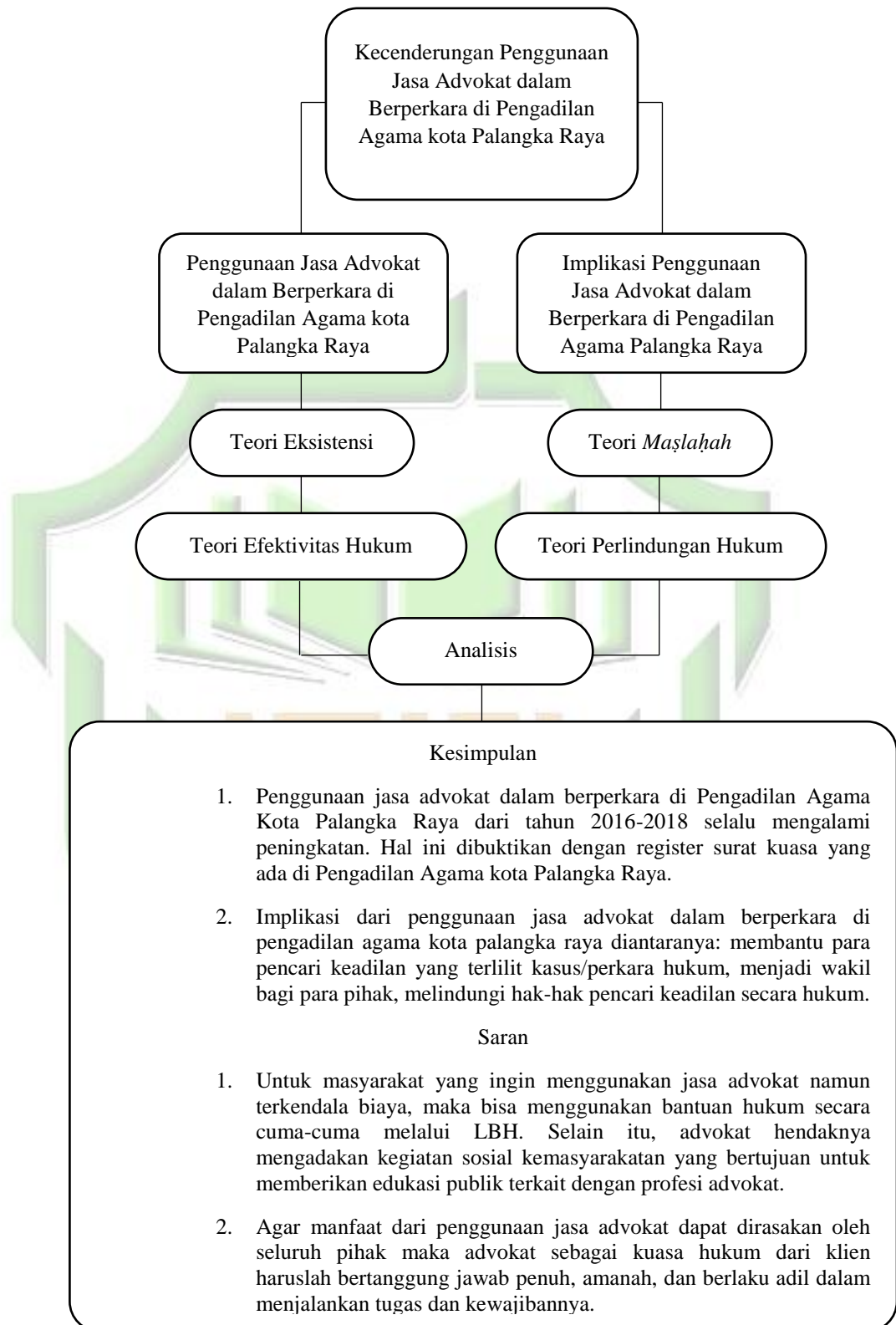
⁵⁶ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 134.

2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kecenderungan minimnya penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu data yang didapat dari penelitian ini akan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*data conclusions drawing/verifying*), ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display data* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, yakni mengenai kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Tabel 5 Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut perlu adanya lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.⁵⁷

Hingga tahun 1967 Pengadilan Agama kota Palangka Raya belum juga terbentuk. Masyarakat muslim di kota Palangka Raya merasa perlu adanya suatu instansi Pengadilan Agama di kota Palangka Raya. Melalui tokoh-tokoh masyarakat maka diajukanlah permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat kota Palangka Raya, maka diadakanlah rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2-4 April 1968 di kota Banjarmasin. Hasil dari rapat tersebut ialah adanya usulan untuk

⁵⁷ Profil Pengadilan Agama kota Palangka Raya, <https://pa-palangkaraya.go.id>, diakses pada Selasa, 12 Maret 2019 pukul 19:40 WIB.

segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Agama, maka dibuatlah surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.⁵⁸

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru terealisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 kota Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m2.

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga kepegawaian pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai yakni: Drs. Mohsoni sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA. sebagai Panitera. Secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975

⁵⁸ *Ibid.*

hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁵⁹

2. Visi, Misi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Visi merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama kota Palangka Raya telah menyusun visi, yakni: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”.⁶⁰

Sedangkan Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama kota Palangka Raya dapat melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

- d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.⁶¹

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 02 (dua) merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan/desa sebagai berikut:⁶²

a. Kecamatan Bukit Batu

- 1) Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos: 73221)
- 2) Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos: 73221)
- 3) Kelurahan/Desa Marang (Kodepos: 73222)
- 4) Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos: 73223)
- 5) Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos: 73224)
- 6) Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos: 73225)
- 7) Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos: 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

- 1) Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos: 73111)
- 2) Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos: 73112)
- 3) Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos: 73112)
- 4) Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos: 73118)

c. Kecamatan Pahandut

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- 1) Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos: 73111)
- 2) Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos: 73111)
- 3) Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos: 73111)
- 4) Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos: 73111)
- 5) Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos: 73111)
- 6) Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos: 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

- 1) Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos: 73227)
- 2) Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos: 73228)
- 3) Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos: 73229)
- 4) Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos: 73229)
- 5) Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos: 73229)
- 6) Kelurahan/Desa Pager (Kodepos: 73229)
- 7) Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos: 73229)

e. Kecamatan Sebangau

- 1) Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos: 73113)
- 2) Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos: 73113)
- 3) Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos: 73114)
- 4) Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos: 73114)
- 5) Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos: 73114)
- 6) Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos: 73114)

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama kota Palangka Raya

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan (Izin Nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Cerai gugat, Itsbat nikah, Izin Poligami, Hak bekas isteri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali dan Pengangkatan anak), Itsbat Rukyatul Hilal, Waris (Gugat waris dan Penetapan ahli waris), Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah (Bank Syari'ah, Bisnis Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro syari'ah, Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah serta Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah).⁶³

b. Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

⁶³ *Ibid.*

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- 6) Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁴

B. Laporan Hasil Penelitian

Data hasil wawancara penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian dengan teknik wawancara. Adapun pemaparan hasil penelitian ini peneliti peroleh melalui wawancara kepada 4 (empat) subjek penelitian ditambah dengan informan guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?

- a. Subjek pertama

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial SU⁶⁵ selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini menggunakan jasa advokat, SU menjawab:

Saya dalam berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya ini menggunakan jasa advokat. Ya, guna membantu persidangan saya. Maklum saya juga nggak terlalu paham terkait hal-hal dalam persidangan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ SU merupakan subjek penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:40-09:00 WIB.

Peneliti menanyakan kepada subjek penelitian terkait alasannya menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menjawab:

Alasan saya menggunakan jasa advokat karena saya tidak paham hukum. Jujur, saya baru pertama kali berperkara di Pengadilan Agama ini. Selain itu, saya juga nggak mau terlalu berlarut-larut menjalani persidangan ini. Makanya saya memutuskan untuk menyewa jasanya sebagai kuasa hukum saya di persidangan. Karena menurut saya, advokat adalah seseorang yang bisa memberikan nasihat hukum dan bisa menjadi pendamping atau mewakili orang yang bermasalah dengan hukum untuk diselesaikan di persidangan. Harapan saya, dengan adanya seorang advokat maka perkara saya bisa berjalan dengan lancar hingga putusan nanti.⁶⁶

b. Subjek kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/i HS⁶⁷ selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini anda menggunakan jasa advokat, HS menjawab:

Benar, saya menyewa beberapa orang advokat untuk menjadi kuasa hukum saya di pengadilan agama palangka raya ini.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada HS tentang alasannya untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, HS menjawab:

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Subjek penelitian yang berinisial HS merupakan salah satu orang yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran banyumas, 12 Oktober 1982 ini dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:10-09:35 WIB.

Pertama, perkara yang saya hadapi ini termasuk perkara yang cukup sulit. Sehingga saya membutuhkan seseorang yang ahli di bidang hukum. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menyewa pengacara saja. Kedua, terkadang saya tidak bisa berhadir di persidangan. Sedangkan saya ingin perkara ini cepat selesai. Maka saya pun memilih seorang advokat untuk menjadi kuasa hukum dan sebagai wakil saya di persidangan.⁶⁸

c. Subjek ketiga

Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada subjek penelitian yang berinisial BS⁶⁹ selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya terkait apakah dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini menggunakan jasa advokat, BS menjawab:

Dalam berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya ini saya tidak menggunakan jasa pengacara. Sampai saat ini, saya hanya didampingi oleh rekan saya tanpa menyewa jasa pengacara.

Dari penjelasan tersebut BS menyatakan bahwa dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ia tidak menggunakan jasa advokat. Berhubung subjek penelitian ketiga tidak menggunakan jasa advokat, maka peneliti menanyakan kepadanya mengapa dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tidak menggunakan jasa advokat, BS menjawab:

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Subjek Penelitian berinisial BS ini merupakan masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Subjek penelitian kelahiran Klaten, 20 September 1958 ini merupakan seorang pensiunan PNS. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 04 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:00-08:20 WIB.

Kalau saya pikir, memang banyak manfaatnya jika menggunakan jasa advokat untuk berperkara di Pengadilan Agama. Akan tetapi, sebagai seseorang yang sedikit banyaknya paham juga dengan hukum, lagipula saya kan seorang pensiunan PNS, maka saya merasa mampu untuk menghadapi permasalahan saya sendiri tanpa meminta bantuan dari seorang pengacara. Saya juga paham dan mengerti tentang proses beracara di Pengadilan. Menurut saya malah memperlambat proses persidangan jika menggunakan jasa advokat. Oleh karena itu, lebih baik saya sendiri yang menghadapi dan menjalani setiap proses persidangan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini. Apalagi perlu biaya yang lumayan banyak kalau kita ingin menyewa jasa advokat. Seharusnya, setiap advokat itu jangan terlalu mematok harga yang terlalu tinggilah, karena yang lebih penting itu adalah membantu orang. Saya pribadi lebih memilih untuk tidak memakai jasa advokat, karena buang-buang uang saja belum tentu kita bisa menang di Pengadilan, kalau kalah gimana?⁷⁰

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sebagai seorang pensiunan PNS BS menganggap dirinya cukup mengerti dan memahami tentang hukum acara di persidangan. Oleh sebab itu, BS merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi persidangan tanpa bantuan dari seorang advokat. Lebih lanjut BS mengungkapkan bahwa dengan menggunakan jasa advokat cenderung lebih memperlambat proses persidangan. Ia juga mengeluhkan terkait besarnya *fee* yang diberikan kepada advokat sebagai kuasa hukum di persidangan.

d. Subjek keempat

⁷⁰ *Ibid.*

Beranjak kepada subjek penelitian yang terakhir, maka peneliti menanyakan hal serupa kepada M⁷¹ selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yakni apakah dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini menggunakan jasa advokat, M menjawab:

Saya dalam berperkara ini tidak menggunakan jasa advokat. Namun, setiap persidangan saya selalu didampingi oleh pihak keluarga saja, terutama ibu saya.

Hal yang sama terjadi pada M selaku orang yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Peneliti pun berusaha menanyakan terkait alasannya tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, M menjawab:

Saya kurang begitu mengetahui terkait profesi advokat ini. Maklum saja karena saya hanya lulusan SD dan bekerjapun hanya serabutan saja. Jadi saya kurang begitu paham dengan hal tersebut.⁷²

Pemaparan di atas mengungkapkan fakta bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui profesi advokat dan M adalah salah satu dari sebagian kecil tersebut. Dari penjelasan di atas mengungkapkan fakta bahwa salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di

⁷¹ Subjek Penelitian berinisial M ini merupakan masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Subjek penelitian kelahiran Banjarmasin, 10 Nopember 1989 ini hanyalah pekerja swasta. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 04 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-08:55 WIB.

⁷² *Ibid.*

Pengadilan Agama kota Palangka Raya adalah perkaranya yang terbilang rumit. Sehingga mengharuskan untuk menggunakan jasa advokat untuk berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selain itu, alasan lainnya adalah tingkat kesibukan masyarakat yang begitu padat. Sehingga perlu adanya seseorang yang bisa menjadi wakilnya di persidangan guna kelancaran proses persidangan.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa M dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya juga tidak menggunakan jasa advokat. Peneliti merasa perlu untuk menambah data guna menjawab rumusan masalah tentang kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Setiap tahunnya selalu ada masyarakat yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Walaupun ada, namun penggunaan jasa advokat tidak begitu stabil tiap tahunnya. Jika merujuk pada statistik register surat kuasa dari tahun 2016-2018 presentase penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya hanya berkisar 5-10 % dari rata-rata 500-600 perkara tiap tahun. Berdasarkan statistik dari register surat kuasa tersebut, penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya bisa dikatakan minim.⁷³

⁷³ Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial DASL dengan latarbelakang pendidikan Sarjana Agama. Informan kelahiran Sukoharjo, 23 Juli 1964 ini bekerja sebagai Panitera Muda (PANMUD) Hukum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 14:00-14:30 WIB.

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan DASL mengenai pandangannya tentang kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara bersama informan berikutnya.

Ada banyak perkara-perkara yang menggunakan jasa advokat, antara lain: cerai talak dan cerai gugat, hadhanah, waris, ekonomi syari'ah dan lainnya. Akan tetapi, yang paling sering adalah cerai gugat. Dikarenakan perkara cerai gugat adalah perkara yang paling banyak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya setiap tahunnya.⁷⁴

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang peneliti tanyakan bersama informan mengenai perkara-perkara yang sering menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

2. Bagaimana Implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?
 - a. Subjek pertama

Peneliti menanyakan kepada SU terkait manfaat yang diperoleh ketika menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menjawab:

Pastinya kita merasa terbantu dengan kehadiran seorang pengacara disamping kita. Kemudian, dari segi proses persidangan pun saya menyerahkan sepenuhnya kepada

⁷⁴ Informan yang berinisial SH merupakan salah satu Panitera Muda (PANMUD) Gugatan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Lahir di Padang Batung, 06 Desember 1967, lulusan Sarjana Agama. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:00-08:45 WIB.

kuasa hukum saya. Jadi, saya tidak perlu repot menangani kasus saya. Selain itu, saya juga sambil belajar kepada mereka (advokat) bagaimana caranya menangani kasus/perkara di Pengadilan. Sebenarnya banyak manfaatnya, akan tetapi secara garis besar itulah manfaat-manfaat yang saya rasakan.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya salah satunya adalah tidak paham hukum. Selain itu, manfaat yang didapat ketika menggunakan jasa advokat diantaranya: mempermudah proses persidangan, tidak terlalu membebani klien, saling berbagi dan menambah wawasan serta pengetahuan.

b. Subjek kedua

Kemudian peneliti menanyakan kepada HS terkait manfaat yang didapat ketika menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, HS menjawab:

Pada intinya, kedua belah pihak (klien dan advokat) sama-sama memperoleh manfaat. Saya selaku klien mendapatkan manfaat dari segi kelancaran proses persidangan. mulai dari proses administrasi dia (advokat) yang mengurus, mengenai proses beracara seperti surat permohonan, jawab menjawab itu sudah menjadi tugasnya sebagai kuasa hukum saya. Jadi saya merasa tidak terlalu dibebani dengan proses persidangan yang saya sendiri pun tidak terlalu memahami dan mengerti.⁷⁶

⁷⁵ SU merupakan subjek penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:40-09:00 WIB.

⁷⁶ Subjek penelitian yang berinisial HS merupakan salah satu orang yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran banyumas, 12 Oktober 1982 ini dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:10-09:35 WIB.

Selain itu, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada AH selaku informan penelitian terkait manfaat ketika menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, AH menjawab:

Tentunya terdapat banyak manfaat apabila para pihak menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum atau wakilnya dalam persidangan, diantaranya: mempermudah tanya jawab dalam persidangan, memperlancar proses beracara dan lainnya. Bahkan manfaat tersebut juga dirasakan oleh panitera pengganti, seperti mempermudah panitera pengganti untuk membuat BAP.⁷⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada FA selaku advokat yang sering menjadi kuasa hukum pada saat berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, ia menyatakan pendapatnya manfaat menggunakan advokat dalam berperkara, yakni:

Sebagai seorang advokat, kita senang dapat membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dan ada kepuasan tersendiri dalam hal tersebut. Adapun manfaat lainnya, kita bisa sambil belajar, dan saling bertukar pikiran, serta dapat mengasah kemampuan kita dalam menganalisa suatu perkara dan memecahkannya. Pada intinya, ada timbal balik antara kami dan para pihak yang menggunakan advokat, sama-sama mendapatkan manfaat.⁷⁸

⁷⁷ AH merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Informan kelahiran Marabahan, 06 Agustus 1966 ini adalah lulusan Magister Hukum. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 13:50-14:20 WIB.

⁷⁸ Informan berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Informan kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai anggota organisasi KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 20 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 19:15-20:05 WIB.

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan jasa advokat tersebut salah satunya adalah terbantunya klien dalam berperkara di persidangan. Kemudian klien tidak perlu repot untuk mengurus hal-hal yang terkait dalam proses beracara di persidangan. Semua hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab seorang advokat yang menjadi kuasa hukumnya.

C. Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Eksistensi Profesi Advokat di Kota Palangka Raya

a. Ditinjau dari Teori Eksistensi

Menurut Save M. Dagun, konsep eksistensi dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting dan terutama adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya.⁷⁹ Eksistensi merupakan hal yang penting bagi setiap kelompok. Melalui eksistensi, suatu kelompok sosial akan diakui keberadannya. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui eksistensi profesi advokat di kota palangka raya haruslah dilihat dari keberadaan profesi tersebut. Berikut ini adalah jumlah advokat dan strategi advokat kota palangka raya dalam mempertahankan dan menjaga eksistensinya di dunia advokat.

1) Jumlah advokat di kota Palangka Raya

⁷⁹ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*,...h. 33.

Jumlah advokat di kota Palangka Raya sebagaimana yang dituturkan oleh FA selaku Sekertaris Kongres Advokat Indonesia (KAI)⁸⁰ cabang Palangka Raya yang menyatakan bahwa sampai saat ini jumlah advokat yang bergabung di KAI hanya berjumlah 40 orang. Sedangkan jumlah advokat yang berada dalam naungan Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) di Palangka Raya sampai tahun 2019 berjumlah 61 orang. Berdasarkan pernyataan di atas, maka jumlah advokat yang tergabung dalam organisasi advokat seperti KAI dan Peradi masih terbilang minim.

Jika dibandingkan antara jumlah advokat dan jumlah penduduk di kota Palangka Raya yang berjumlah 275.667 jiwa lebih, maka jumlah advokat masih belum memadai untuk seukuran kota Palangka Raya yang luas wilayahnya mencapai 2.853,52 kilo meter persegi.⁸¹ Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kota Palangka Raya hanya memiliki advokat sekitar 101 orang yang tergabung dalam organisasi KAI dan Peradi untuk wilayah kota Palangka Raya. Hal ini tentu

⁸⁰ Informan berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Informan kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai anggota organisasi KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 20 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 19:15-20:05 WIB.

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Palangka Raya: CV. Putra Azka Pratama, 2017, h. 11.

mempengaruhi tingkat pelayanan hukum bagi masyarakat di kota Palangka Raya.

Meskipun eksistensi dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat bukan satu-satunya diukur dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah advokat, namun ketersediaan sumber daya manusia yang memadai mempunyai korelasi yang tak terpisahkan dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembangunan hukum di Indonesia, khususnya di kota Palangka Raya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan akan profesi advokat pada masa mendatang semakin melambung tinggi sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kompleksitasnya permasalahan hukum. Persoalannya memang bukan sekedar berapa banyak jumlah advokat, melainkan kualitas dari pelayanan dan penegakan supremasi hukumnya. Tidak ada artinya jika jumlah advokat di kota Palangka Raya begitu banyak, namun pembangunan dan penegakan supremasi hukumnya tidak berjalan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan teori eksistensi, maka profesi advokat di kota Palangka Raya sudah termasuk dalam kategori eksis. Dikarenakan eksistensi berbicara tentang keberadaan sesuatu, hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah orang yang berprofesi sebagai advokat di kota Palangka Raya.

2) Strategi advokat kota Palangka Raya dalam mempertahankan eksistensinya

Dewasa ini banyak sekali lulusan sarjana hukum yang memilih advokat sebagai profesinya. Akan tetapi, dari sekian banyak sarjana hukum yang menggeluti profesi advokat hanya segelintir yang sukses mengelola profesinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ketidakmampuan advokat dalam mempertahankan eksistensi profesi yang diembannya. Terkait upaya dalam mempertahankan eksistensinya, sebagian advokat di kota Palangka Raya memiliki strategi tersendiri, diantaranya: *pertama*, memaksimalkan peran media sosial, seperti *blog*, *website*, *facebook* dan *instagram*.

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet diimbangi dengan kemajuan teknologi langsung dimanfaatkan oleh sebagian advokat di kota Palangka Raya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait profesi advokat, program kerja, bantuan hukum, maupun tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal ini diamini oleh FA yang menyatakan bahwa dengan memanfaatkan peran media sosial maka akan mempermudah masyarakat mengakses informasi-informasi seputar profesi advokat. Menurutnya, di zaman yang serba digital masyarakat tentu sudah tidak buta lagi dengan

media sosial. Terbukti dengan pemanfaatan media sosial ini, terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum dalam persidangan. Tambahnya, ada pula masyarakat yang berkonsultasi seputar permasalahan yang dihadapinya.⁸²

Kedua, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Peran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan sumber daya advokat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan ikut serta dalam organisasi kekeluargaan, organisasi advokat, organisasi keagamaan, organisasi lingkungan/domisili, dan organisasi kemasyarakatan bidang hukum. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh KC, bahwa banyak upaya yang dilakukan untuk mengenalkan profesi advokat kepada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan dan lainnya.⁸³ KC menambahkan bahwa upaya lain dalam mengenalkan profesi advokat kepada masyarakat ialah dengan turut mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2A) kepada

⁸² Informan berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Informan kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai anggota organisasi KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 20 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 19:15-20:05 WIB.

⁸³ Informan dengan inisial KC ini berprofesi sebagai Advokat dari tahun 2007 hingga sekarang. Informan kelahiran Tulungagung, 11 April 1984 ini juga merupakan anggota Organisasi PERADI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 10:10-10:40 WIB.

masyarakat berupa pelayanan hukum mulai dari konsultasi hukum, pendampingan hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta mediasi. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sembari mengenalkan profesi advokat.⁸⁴

Dalam eksistensi, seseorang harus melakukan berbagai macam cara untuk bisa menunjukkan ke-eksistensinya. Oleh karena itu, sebagian advokat di kota Palangka Raya juga sudah melakukan hal tersebut yang dibuktikan dengan adanya strategi khusus untuk mempertahankan eksistensinya sebagai profesi advokat.

2. Jumlah Pengguna Jasa Advokat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Salah satu tugas seorang advokat yang termaktub dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat adalah membela kepentingan klien baik secara litigasi maupun non litigasi dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*). Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan suatu badan yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁵

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi yang sangat urgen dalam

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 23.

tata kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Secara filosofi, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aturan Islam guna menata kehidupan masyarakat Indonesia.

Advokat sehari-harinya memang bergelut dengan masalah yang berkaitan dengan hukum. Ladang para advokat adalah masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Apabila seorang masyarakat membutuhkan bantuan hukum lalu datang kepada advokat maka ia akan menjadi klien bagi advokat. Setiap beracara di pengadilan maupun di lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka pihak yang mewakili harus menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan surat kuasa. Salah satu jenis surat kuasa yang digunakan dalam beracara di pengadilan ialah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus merupakan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.⁸⁶ Dalam hal ini, pemberi kuasa disebut sebagai pengguna jasa advokat sedangkan penerima kuasa disebut sebagai advokat.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1

Berdasarkan register surat kuasa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018 tercatat bahwa pada tahun 2016 sebanyak 22 perkara yang menggunakan jasa advokat dari 571 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Dengan demikian, sebanyak 549 perkara yang di dalamnya tidak menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum di persidangan. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat sebanyak 23 perkara dari 623 perkara yang terdaftar. Sedangkan 600 perkara sisanya tidak menggunakan jasa advokat. Pada tahun tersebut juga tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Kemudian, pada tahun 2018, sebanyak 427 perkara tidak menggunakan jasa advokat dari 483 perkara yang masuk. Artinya, hanya 56 perkara yang di dalamnya terdapat advokat sebagai kuasa hukum.⁸⁷

Total keseluruhan pengguna jasa advokat dari tahun 2016-2018 berjumlah 101 orang dengan rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Palangka Raya berkisar antara 500-600 perkara tiap tahunnya. Berikut adalah uraian dalam bentuk tabel terkait jumlah perkara yang masuk, jumlah pengguna jasa advokat dan jumlah yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018:

⁸⁷ Lihat lampiran register surat kuasa Pengadilan Agama kota Palangka Raya tahun 2016-2018.

Tabel 6 Data perkara yang menggunakan jasa advokat/tidak menggunakan berdasarkan Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

No.	Jumlah Register Perkara	Jumlah Perkara yang Menggunakan Jasa Advokat	Jumlah Perkara yang Tidak Menggunakan Jasa Advokat	Tahun
01.	571 Perkara	22 Perkara	549 Perkara	2016
02.	623 Perkara	23 Perkara	600 Perkara	2017
03.	483 Perkara	56 Perkara	427 Perkara	2018

Terkait jenis perkara yang sering menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya cenderung didominasi oleh perkara cerai gugat. Hal ini dituturkan SH saat menjawab pertanyaan dari peneliti terkait jenis perkara yang sering menggunakan jasa advokat. Menurutnya, perkara cerai gugat adalah perkara yang sering menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. hal ini dikarenakan perkara tersebut adalah perkara yang paling banyak terdaftar di Pengadilan Agama kota Palangka Raya setiap tahunnya. Namun, ia menambahkan bahwa tidak hanya perkara cerai gugat, akan tetapi banyak perkara yang juga menggunakan jasa advokat seperti cerai talak dan cerai gugat, hadhanah, waris, ekonomi syari'ah dan lainnya. Namun, yang paling dominan ialah perkara cerai gugat.⁸⁸

⁸⁸ Informan yang berinisial SH merupakan salah satu Panitera Muda (PANMUD) Gugatan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Lahir di Padang Batung, 06 Desember 1967, lulusan Sarjana Agama. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:00-08:45 WIB.

Berdasarkan fakta di atas, bahwa setiap tahunnya selalu ada masyarakat yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Jika merujuk pada register surat kuasa Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018 cenderung terjadi kenaikan terhadap penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Meskipun demikian, jumlah yang tidak menggunakan jasa advokat lebih banyak daripada jumlah pengguna jasa advokat. Hal ini juga dituturkan oleh DASL yang menganggap bahwa presentase penggunaan jasa advokat secara keseluruhan masih tergolong minim yakni hanya berkisar 5-10 % dari rata-rata 500-600 perkara tiap tahunnya.⁸⁹ Akan tetapi, untuk seukuran Pengadilan Agama yang notabeneanya mengadili, memeriksa, dan memutus perkara-perkara perdata maka jumlah pengguna jasa advokat sudah tergolong lumayan besar. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri yang di dalamnya mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana tentu sudah menjadi hal yang wajar jikalau banyak para pihak yang menggunakan jasa advokat.

a. Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Munir bahwa suatu aturan hukum harus valid terlebih dahulu baru diketahui apakah kaidah tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan

⁸⁹ Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial DASL dengan latarbelakang pendidikan Sarjana Agama. Informan kelahiran Sukoharjo, 23 Juli 1964 ini bekerja sebagai Panitera Muda (PANMUD) Hukum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 14:00-14:30 WIB.

ternyata mengalami kegagalan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang validitasnya, sehingga berubah sifat dari valid menjadi tidak valid lagi.⁹⁰

Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yakni: *pertama*, kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; *kedua*, kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁹¹ Dalam buku *Pure Theory of Law* (teori hukum murni) Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut:⁹²

...A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation – therefore the statute had a chance to become “effective” – But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective.

(...norma hukum menjadi valid sebelum menjadi efektif, yakni sebelum diterapkan dan dipatuhi; pengadilan hukum yang menerapkan undang-undang segera setelah di undangkan – oleh karena itu, undang-undang tersebut memiliki peluang untuk menjadi “efektif” – norma hukum tidak lagi dianggap valid, apabila tidak efektif.)

Menurut Hans Kelsen suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka

⁹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h 116.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, demikian pendapat Hans Kelsen. Selain itu, Jeremy Bentham menegaskan dalam bukunya *The Theory of Legislation*:

... Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena semua ekspektasi memiliki kecenderungan alamiah menuju manfaat.

Agar menjadi pengontrol ekspektasi, hukum harus dipikirkan sebagai sesuatu yang pasti untuk dijalankan... Dengan kata lain, hukum semakin mudah untuk dielakkan, tetapi akan lebih kejam bila menciptakan hukum yang tanpanya nyaris tidak mungkin dijalankan...⁹³

Sejak lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat maka sejak saat itu profesi advokat sudah mendapat pengakuan dari Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai kebaikan dalam profesinya serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai profesi yang mendapat predikat *officium nobile* ini. Untuk mengukur efektivitas hukum, sebagai mana yang dijelaskan oleh Hans Kelsen di atas, maka peneliti berusaha melihat melalui pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun jasa hukum yang diberikan oleh advokat dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum,

⁹³ Sabian Utsman, *Restorative Justice (Hukum masyarakat nelayan saka dalam sistem hukum nasional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 45. Lihat juga sumber aslinya Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: Nusa Media, 2010, h. 183-186.

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dari pemaparan data sebelumnya, terdapat sejumlah advokat sebagai kuasa hukum bagi klien yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Sedangkan total keseluruhan pengguna jasa advokat dari tahun 2016-2018 berjumlah 101 orang. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2) tersebut, maka advokat kota Palangka Raya sudah menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain memiliki tugas sebagai pemberi jasa hukum, seorang advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 22 dijelaskan bahwa seorang yang berprofesi sebagai advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Terkait dalam hal pemberian bantuan hukum, maka Pengadilan Agama kota Palangka Raya bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sahabat Hukum kota Palangka Raya. Berdasarkan data jumlah pengguna bantuan hukum yang ada di LBH Sahabat Hukum dari tahun 2016-2018 hanya berjumlah 16

orang pengguna bantuan hukum. Bantuan hukum dalam hal ini ialah pengguna jasa advokat oleh masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Untuk lebih rincinya, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:⁹⁴

Tabel 7 Data Pengguna Bantuan Hukum di LBH Sahabat Hukum

NO.	TAHUN	RINCIAN PERKARA	JUMLAH
01.	2016	—	0
02.	2017	3 Cerai Gugat	3
03.	2018	- 3 Cerai Gugat - 9 Itsbat Nikah - 1 Perubahan Identitas dalam Akta Nikah	13
TOTAL			16

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas advokat sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yakni sebagai pemberi jasa hukum dalam hal menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela klien dapat dinyatakan sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, efektivitas hukum jika dilihat dari penerapan kaidah hukumnya maka dalam hal ini sudah berlaku dalam

⁹⁴ Lihat lampiran data jumlah pengguna jasa advokat secara cuma-cuma

penggunaan jasa advokat saat berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Advokat

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.⁹⁵ Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Mirisnya, ada sebagian oknum advokat yang menjadi mafia peradilan. Sabian utsman menyatakan pendapat Moh. Mahfud MD., secara lantang berteriak bahwa:

...Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas...⁹⁶

Ini menunjukkan bahwa advokat dalam menjalankan profesi sangat dekat dengan praktik mafia peradilan. Oknum advokat nakal

⁹⁵ Fidel, *Review Ujian Advokat*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010, h. 74.

⁹⁶ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 14. Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud Md, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 76-77.

seringkali menggunakan jaringannya di lembaga peradilan untuk memenangkan sebuah perkara dengan bayaran tertentu. Dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia. Lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.⁹⁷

Berdasarkan berbagai dinamika yang terjadi di dunia peradilan selama ini maka sangat wajar kalau advokat harus bertindak secara profesional menangani perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Saat ini banyak kasus hukum yang cenderung mengorbankan pihak rakyat dan hukum. Perkara hukum terhadap rakyat kecil pun tidak terungkap dengan jelas. Kasus ketidakadilan dan kesesatan hukum menjadi praktik buruk dan kelemahan hukum di dunia peradilan Indonesia selama ini. Penegakan hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga antara kepentingan atas kehadiran advokat dapat berdampak positif terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia. Hal tersebut tentu berdampak terhadap penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan. Pro dan kontra profesi advokat juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasanya di persidangan.

⁹⁷ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia...*, h. 3.

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh peneliti dari wawancara, dokumentasi dan observasi terkait penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Adapun tiga faktor tersebut sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum

Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum acara perdata. Selain itu, terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang tidak memahami proses beracara di persidangan. Belum lagi banyak masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum tidak mengetahui bagaimana caranya untuk membela diri di depan persidangan serta tidak tahu harus berbuat apa. Hal tersebut juga diakui oleh FA⁹⁸, ia menerangkan bahwa seringkali masyarakat datang menemui advokat untuk meminta bantuan dalam berperkara disebabkan karena tidak memahami prosedur berperkara di persidangan. Ia menambahkan bahwa tak jarang seorang sarjana hukum pun tidak terlalu menguasai terkait beracara di persidangan.

⁹⁸ Informan berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Informan kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai anggota organisasi KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 20 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 19:15-20:05 WIB.

hal ini dikarenakan para sarjana hukum tersebut hanya mempelajari teori tanpa melakukan praktik di lapangan.

Parahnya, ada sebagian kecil masyarakat tidak mengetahui sama sekali terkait profesi advokat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh M⁹⁹ selalu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya menuturkan bahwa ia tidak mengetahui apa itu profesi advokat. Menurutnya, ketidaktahuan tersebut didasarkan pada rendah taraf pendidikan yang ia tempuh sehingga menyebabkan ia tidak familiar dengan kata advokat tersebut.

Selain itu, M selaku hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya juga menambahkan bahwa para pihak seringkali tidak bisa mengemukakan peristiwa atau fakta hukum secara jelas di muka persidangan sehingga dapat menghambat jalannya persidangan. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret terkait permasalahan yang dihadapinya dalam persidangan. ia menuturkan kebanyakan para pihak cenderung kaku dalam menjelaskan peristiwa hukum yang dihadapinya. Tentu hal ini menjadi kendala tersendiri bagi hakim dalam menggali fakta hukum. Jika para pihak didampingi oleh pengacara atau advokat sebagai kuasa hukum atau wakil dari para pihak, tentu sangat

⁹⁹ Subjek Penelitian berinisial M ini merupakan masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Subjek penelitian kelahiran Banjarmasin, 10 Nopember 1989 ini hanyalah pekerja swasta. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 04 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-08:55 WIB.

membantu para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang sedang dijalani.¹⁰⁰ Ia juga menyatakan bahwa upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memberikan pemahaman lebih kepada para pihak yang berperkara. Ia menegaskan agar hakim harus memaklumi dan berusaha untuk sabar dalam menjelaskan kepada para pihak yang belum memahami dan mengerti seputar proses beracara dalam persidangan demi kelancaran proses persidangan.¹⁰¹

Disamping itu, SU¹⁰² selaku pihak yang menggunakan jasa advokat juga menyatakan alasannya untuk menggunakan jasa advokat, yakni disebabkan ketidakpahaman terhadap hukum acara perdata dan kurang memahami terkait prosedur beracara di pengadilan agama. ia menambahkan selain faktor tidak paham hukum, juga dikarenakan baru pertama kali berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya adalah tidak memahami hukum beracara di persidangan. Menurut hemat

¹⁰⁰ Informan berinisial M kelahiran Kuala Kapuas, 26 Februari 1966 ini merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan berlatarbelakang Magister Hukum ini peneliti wawancarai langsung di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 14:25-14:55 WIB.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² SU merupakan subjek penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:40-09:00 WIB.

peneliti, setiap aparat penegak hukum perlu memberikan edukasi publik dengan cara membuka ruang komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat guna memberikan pengetahuan seputar hukum sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan hukum di masyarakat.

b. Asumsi Masyarakat terhadap Besarnya Honorarium Advokat

Hampir setiap orang di Indonesia apabila menghadapi suatu masalah di bidang hukum cenderung untuk menggunakan jasa profesi Advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kasus perbankan, bahkan sampai kepada *public figure* sekalipun juga menggunakan jasa Advokat. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan ekonomi menengah keatas. Kebanyakan masyarakat di Indonesia adalah masyarakat menengah kebawah (miskin), sehingga tidak mampu untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Banyak orang belum mengetahui terkait dengan biaya untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang advokat, khususnya masyarakat awam. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa bayaran untuk seorang advokat sangatlah mahal sehingga ketika seseorang menghadapi permasalahan hukum, sungkan untuk meminta bantuan hukum kepada advokat.

Terkait dengan besaran *fee* yang diterima oleh advokat adalah relatif atau tergantung dengan berbagai hal, seperti jenis perkara, tempat, orang, dan lainnya. Upah advokat akan ditetapkan setelah terjadi kesepakatan antara advokat dan klien. Berat ringannya suatu perkara dapat diketahui setelah dilakukan analisa. Untuk kasus yang ringan dan sederhana maka biaya jasa advokat mulai dari jutaan sampai puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk kasus yang rumit maka biayanya berkisar antara ratusan hingga milyaran rupiah.

Menurut DASL, salah satu penyebab masyarakat tidak menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ialah honorarium advokat yang cukup menelan biaya. Tarif untuk menggunakan advokat tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Terlebih lagi, asumsi tentang besarnya biaya atau tarif advokat sudah berkembang luas di masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.¹⁰³

BS¹⁰⁴ selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya mengeluhkan terkait besarnya *fee* yang

¹⁰³ Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial DASL dengan latarbelakang pendidikan Sarjana Agama. Informan kelahiran Sukoharjo, 23 Juli 1964 ini bekerja sebagai Panitera Muda (PANMUD) Hukum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 14:00-14:30 WIB.

¹⁰⁴ Subjek Penelitian berinisial BS ini merupakan masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Subjek penelitian kelahiran Klaten, 20 September 1958 ini merupakan seorang pensiunan PNS. Peneliti melakukan

diberikan kepada advokat ketika seseorang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan. Menurutnya, perlu biaya yang lumayan banyak kalau ingin menyewa jasa advokat. Seharusnya, setiap advokat jangan terlalu mematok harga tinggi, karena yang lebih penting itu adalah membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongannya.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh SU¹⁰⁵ yang menuturkan bahwa dalam memberikan upah kepada seorang advokat memang cukup mahal. Namun, baginya adalah hal yang wajar karena seorang advokat selalu profesional dalam bekerja. Ia menambahkan, tidak menjadi persoalan untuk masalah biaya asalkan proses persidangan berjalan lancar dan hasilnya bisa memuaskan.

Hal senada disampaikan oleh KC yang beranggapan bahwa sudah menjadi hal wajar jika tarif untuk menggunakan jasa advokat terbilang mahal. Tarif tersebut sudah termasuk biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya administrasi perkara, biaya sidang dan lainnya. Memang benar jika tarif dalam menangani suatu perkara belum diatur dalam undang-undang. Terkadang, masing-masing *lawfirm* memiliki patokan tersendiri terkait tarif atas jasa advokat.

wawancara langsung pada Kamis, 04 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:00-08:20 WIB.

¹⁰⁵ SU merupakan subjek penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:40-09:00 WIB.

Namun, secara umum besaran *fee* yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau bisa juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹⁰⁶

Pada masa sekarang, keadilan dan hak asasi manusia seperti “barang mewah” yang untuk mendapatkannya terkadang membutuhkan pengorbanan. Hal ini tidak terlepas dari sepak terjang advokat sendiri yang terkadang tidak sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Sehingga muncul stigma di masyarakat terhadap profesi advokat, bahwa seorang advokat “maju tak gentar membela yang bayar”. Pandangan tersebut akan meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Oleh sebab itu, seorang advokat dituntut untuk berjiwa ksatria yang tak pandang bulu dalam menolong sesama demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹⁰⁷

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

¹⁰⁶ Informan dengan inisial KC ini berprofesi sebagai Advokat dari tahun 2007 hingga sekarang. Informan kelahiran Tulungagung, 11 April 1984 ini juga merupakan anggota Organisasi PERADI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 10:10-10:40 WIB.

¹⁰⁷ An-Nisā [4]: 135

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa:135).¹⁰⁸

Profesi advokat identik dengan kemewahan dan harta yang berlimpah. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tetapi, dengan segala kemewahan tersebut dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tujuan untuk menggeluti profesi advokat. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut dan lupa bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kewajibannya seorang advokat juga harus memiliki *self control* agar sesuai dengan amanat yang tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat serta kode etik advokat.

Sistem hukum di Indonesia memberikan jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, seorang yang terlilit kasus hukum mempunyai hak untuk

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 100.

mendapatkan bantuan hukum. Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu, kehadiran advokat mempunyai arti yang sangat penting di masyarakat.

Masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah, sering mengalami kesulitan dalam menyewa jasa seorang advokat. Oleh sebab itu, agar masyarakat tetap dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya maka bisa diperoleh melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Saat ini di setiap lembaga peradilan juga sudah terdapat Posko Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagaimana yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, menyatakan bahwa posbakum adalah lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara, bertugas untuk memberikan bantuan atau layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi: informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela

kepentingan para pihak berperkara dalam hal tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.¹⁰⁹

R¹¹⁰ menyatakan bahwa jika masyarakat ingin menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan maka posbakum akan mengarahkan langsung ke Lembaga Bantuan Hukum “Sahabat Hukum”. Dikarenakan, Pengadilan Agama kota Palangka Raya bekerja sama dengan LBH tersebut dalam hal penyediaan jasa advokat untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan jasanya namun tidak mampu dalam membiayai kuasa hukumnya.¹¹¹ Adapun yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS, atau kartu bantuan

¹⁰⁹ Informan yang berinisial R, kelahiran Palangka Raya, 06 Mei 1982 ini merupakan *Para Legal* di Posko Bantuan Hukum Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan dengan latarbelakang Magister Hukum ini juga menjabat sebagai Sekretaris LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Posko Bantuan Hukum Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:30-10:05 WIB.

¹¹⁰ Informan yang berinisial R, kelahiran Palangka Raya, 06 Mei 1982 ini merupakan Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan dengan latarbelakang Magister Hukum ini juga menjabat sebagai Sekretaris LBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Posko Bantuan Hukum Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:30-10:05 WIB.

¹¹¹ *Ibid.*

langsung tunai (BLT). Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara *prodeo*, seperti: perceraian, itsbat nikah, permohonan wali adhol, waris, hibah, perwalian anak, harta bersama, dan lainnya.¹¹²

Selain melalui lembaga bantuan hukum, seseorang yang terlilit kasus hukum juga bisa berkonsultasi dengan meminta bantuan seorang advokat untuk memberikan pendapat hukumnya terkait perkara yang sedang dihadapi. Cara seperti ini relatif dapat menekan biaya bagi yang tidak mampu menggunakan jasa advokat. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dalam menghadapi proses persidangan di pengadilan. Sehingga ketika menghadapi permasalahan hukum yang sama dilain hari maka sudah ada gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Namun, alternatif ini juga memiliki kekurangan, seperti tidak didampingi oleh seorang advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan.

c. Padatnya Aktivitas Para Pihak

Berperkara di muka persidangan biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga dapat menyita waktu, pikiran dan tenaga sehingga akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Proses persidangan juga bisa dilakukan secara mandiri, mulai dari penyusunan gugatan, pendaftaran perkara, menunggu

¹¹² *Ibid.*

panggilan sidang, menjalani persidangan, pembuktian hingga sampai pada tahap putusan. Akan tetapi dikarenakan rumitnya proses tersebut, maka banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa advokat untuk menjadi kuasa hukumnya di persidangan.

SH¹¹³ juga menambahkan bahwa pada intinya para pihak tidak ingin mempersulit diri untuk menjalani proses persidangan yang cukup memakan waktu dan menguras tenaga. Belum lagi ditambah dengan padatnya kegiatan atau aktivitas para pihak sehingga tidak memungkinkan untuk selalu hadir dalam setiap proses persidangan. dengan keadaan demikian, sangat memungkinkan para pihak untuk menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan.

Fakta diatas juga diakui oleh HS¹¹⁴ selaku pihak yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Ia menyatakan bahwa seringkali tidak bisa menghadiri proses persidangan disebabkan padatnya rutinitas pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Dengan demikian, ia merasa perlu untuk menyewa seorang advokat sebagai wakilnya di

¹¹³ Informan yang berinisial SH merupakan salah satu Panitera Muda (PANMUD) Gugatan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Lahir di Padang Batung, 06 Desember 1967, lulusan Sarjana Agama. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 14 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:00-08:45 WIB.

¹¹⁴ Subjek penelitian yang berinisial HS merupakan salah satu orang yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. subjek penelitian kelahiran banyumas, 12 Oktober 1982 ini dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 11 April 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:10-09:35 WIB.

persidangan guna kelancaran proses persidangan. Faktor kesibukan yang tinggi dari para pihak inilah yang memungkinkan mereka untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa informan di atas. Oleh sebab itu, faktor kesibukan para pihak juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

D. Implikasi Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Ditinjau dari Teori *Maṣlahah*

a. Penggunaan jasa advokat dilihat dari arti/makna *maṣlahah*

Berdasarkan paparan data sebelumnya, menggunakan jasa advokat ketika berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya memiliki nilai positif bagi masyarakat, terkhusus bagi para pihak yang menggunakan jasanya. Hal ini dapat dilihat dari alasan para pihak yang menggunakan jasa advokat, yakni sebagai kuasa hukum atau wakil mereka dalam persidangan yang dalam hal ini sangat membantu klien dalam menghadapi permasalahan hukum.

Selain itu, profesi advokat sangat erat kaitannya dengan prinsip saling tolong menolong. Sebagaimana diketahui bahwasanya tolong menolong dalam ajaran Islam sangat dianjurkan bahkan diharuskan kepada manusia sebagai makhluk

sosial. Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kehidupan termaktub dalam firman Allah SWT. berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ¹¹⁵

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹⁶

Abu Ja'far berkata bahwasanya maksud dari *wa ta'āwanū* 'alal birri wattaqwā adalah wahai orang-orang yang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan dalam kalimat *wa lā ta'āwanū 'alal itsmi wal 'udwān*, maksudnya adalah hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT. Adapun pada kalimat wattaqullah, innallaha syadīdul 'iqāb, merupakan ancaman dan peringatan dari Allah SWT untuk orang yang melanggar batas-Nya dan mengabaikan perintah-Nya.¹¹⁷

Esensi yang terkandung dari ayat di atas ialah memberikan motivasi agar manusia dalam hal ini advokat untuk selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang

¹¹⁵ Al-Maidah [5]: 2.

¹¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 106..

¹¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 289-291.

sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam penggunaan jasa advokat ketika berperkara di pengadilan sebagai wujud kemaslahatan dari penggunaan jasa advokat tersebut diantaranya:

- 1) Menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama akan lebih praktis bagi klien dari segi waktu. Apalagi jika klien sangat sibuk dalam pekerjaan sehingga tidak bisa menghadiri tiap persidangan maka klien tidak perlu khawatir dikarenakan klien akan diwakilkan oleh advokat sebagai kuasa hukumnya sehingga klien lebih mudah dalam menjalani rangkaian persidangan.
- 2) Dapat menghindari kesalahan dalam membuat berbagai macam dokumen atau surat yang berkaitan dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya seperti: pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun hal lain yang diinginkan oleh klien dalam petitumnya.
- 3) Klien dapat memahami hak-haknya dikarenakan advokat akan menjelaskan hak-hak klien sehingga klien menjadi teredukasi dan lebih mengerti hak-haknya. Salah satu kebingungan masyarakat ketika di hadapkan pada persoalan hukum ialah bagaimana cara membela diri. Tidak sedikit orang yang

kebingungan terkait hal tersebut sehingga mereka merasa tertekan untuk melakukan upaya-upaya hukum.

- 4) Mempermudah hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara karena dengan adanya advokat di persidangan dapat membantu dan mempermudah dalam sesi tanya jawab sehingga dapat melancarkan proses persidangan.
- 5) Dapat mempermudah panitera dalam hal mengurus administrasi serta prosedur berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Tak jarang, pihak yang berperkara tidak memahami sistem administrasi dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sehingga dengan adanya advokat sebagai kuasa hukum klien tentu sangat membantu panitera proses persidangan.

Menurut Ropuan Rambe dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.¹¹⁸ Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakkan keadilan. Manfaat positif yang digambarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat penyelesaian administrasi demi kelancaran persidangan di pengadilan

¹¹⁸ Ropuan Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 36-37.

- 2) Membantu menghadirkan para pihak-pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan;
- 3) Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan;
- 4) Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, sehingga terasa terayomi keadilannya;
- 5) Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan;¹¹⁹

Berdasarkan beberapa manfaat dari pada penggunaan jasa advokat ini, dapat diketahui juga bahwa akan berdampak juga kepada hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sudah mengandung nilai kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.¹²⁰ Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.¹²¹ Kaidah fikih menyatakan:

¹¹⁹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif*,..., h. 70.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 220.

¹²¹ *Ibid.*, h. 222.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”¹²²

Oleh karena itu, bila dilihat dari penggunaan jasa advokat dalam perkara di pengadilan ini, banyak memberikan manfaat yakni adanya sikap tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh kedua belah pihak (klien dan advokat), sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *maṣlaḥah*. Selain itu, peneliti beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam penggunaan jasa advokat ini adalah apabila ada orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersanda: “Sampaikanlah amanah kepada orang yang telah beramanat kepadamu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu.” (H.R. Tirmidzi, Abu Dawud dan Hakim).¹²³

¹²² A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 8.

¹²³ Hadis nomor 862 lihat Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram: Hadis Hukum-Hukum Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Surun, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011, h. 364.

Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap *amānāt* ketika ia disuruh untuk mewakilinya. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk selalu *amānāt* dan berniat untuk saling tolong menolong. Dalam hal ini, niat juga sangat penting untuk menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atautkah hanya melakukan perbuatan tersebut dengan niat sebagai kebiasaan saja. Sebagaimana dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa:

لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”¹²⁴

Dengan niat saling tolong menolong maka akan muncul rasa saling kasih mengasihi sesama manusia. Sehingga penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan terdapat unsur kemashlahatan yakni terciptanya saling tolong menolong antar sesama.

- b. Penggunaan jasa advokat ditinjau dari kualitas atau kepentingan *maṣlaḥah*

Perlu diketahui bahwasanya para ulama membagi *maṣlaḥah* dalam tiga tingkatan, yakni *maṣlaḥah ḍaruriyyah*, *maṣlaḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyyah*. untuk mengetahui

¹²⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,..., h. 56.

penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini termasuk ke dalam tiga tingkatan *maṣlahah* di atas, maka peneliti akan menguraikan definisi serta ruang lingkup ke tiga *maṣlahah* tersebut.

Pertama, maṣlahah ḍaruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah ḍaruriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan penggunaan jasa advokat ini tidak termasuk ke dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyyah*, dikarenakan kemaslahatan dari penggunaan jasa advokat ini tidak sampai kepada hal yang *ḍaruriyyah*. Jika tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, maka tidak akan merusak atau menghancurkan eksistensi lima pokok dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kedua, maṣlahah ḥajiyyah yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya. Dengan kata lain, *maṣlahah ḥajiyyah*

(kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *daruriyyah*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Kendatipun masyarakat tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tidak akan merusak atau menghancurkan kehidupannya. Namun, apabila ada masyarakat terlilit suatu permasalahan hukum yang mengharuskan ia untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau dengan didampingi seorang advokat sebagai kuasa hukumnya maka inilah yang dinamakan sebagai suatu hajat yang diperlukan guna memberikan kemudahan dalam permasalahan yang sedang dihadapi di persidangan dengan cara menggunakan jasa advokat tersebut.

Ketiga, maṣlahah taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain *maṣlahah taḥsiniyyah* (kebutuhan tersier) adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Sudah jelas kiranya bahwa penggunaan jasa

advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini bukan termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah taḥsiniyyah*. dikarenakan penggunaan jasa advokat tersebut bukan sebagai penghias belaka, akan tetapi ia termasuk ke dalam kebutuhan untuk memberikan kemudahan hidup.

Oleh karena itu, menurut kacamata peneliti bahwa kemaslahatan penggunaan jasa advokat jika ditinjau dari segi kualitas atau kekuatannya ia termasuk ke dalam *maṣlaḥah ḥajiyyah*. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa penggunaan jasa advokat berhubungan dengan kebutuhan seseorang untuk mempermudah permasalahan yang dihadapi.

c. Penggunaan jasa advokat dilihat dari ragam *maṣlaḥah*

Dari segi pandangan *syara'*, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yakni *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulgāh*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Ketiga *maṣlaḥah* ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹²⁵ *Maṣlaḥah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah mulgāh* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *maṣlaḥah mursalah* sendiri dianggap

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h. 351.

kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ini dikaitkan dengan ketiga macam *maṣlahah* di atas, maka penggunaan jasa advokat dalam perkara ini termasuk ke dalam jenis *maṣlahah mu'tabarah*. Alasannya ialah bila dilihat dari kegiatan penggunaan jasa advokat ini secara tidak langsung ada petunjuk *syara'* terkait *maṣlahah* penggunaan jasa advokat tersebut. Pada *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah* yang tidak ada petunjuk secara langsung disebut dengan *munāsib mulā'im* yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.¹²⁶

Terkait petunjuk *syara'* yang secara tidak langsung yang menjadi dalil untuk menggunakan jasa advokat tersebut yakni dalam firman Allah SWT:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ٣٤¹²⁷

Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.¹²⁸

Nabi Musa meminta tambahan kekuatan kepada Allah SWT dalam menghadapi fir'aun, yakni dengan diutusnya saudara

¹²⁶ *Ibid.*, h. 352.

¹²⁷ Al-Qashash [28]: 34.

¹²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 389.

laki-lakinya yang bernama Nabi Harun. Nabi Musa menimpali dengan berkata bahwa Nabi Harun itu adalah orang yang fasih lidahnya dalam memberikan penjelasan dan menyampaikan pembicaraan. Sebab, Nabi Musa pada lidahnya memang terdapat bekas goresan akibat bara api yang pernah hendak ia makan di masa kanak-kanaknya. Nabi Musa pun memohon kepada Allah SWT untuk mengutus Nabi Harun bersamanya sebagai orang yang dapat membantu dalam menjelaskan kepada mereka tentang dirinya. Sebab, aku tidak bisa berbicara kepada mereka dengan memberikan diplomasi serta bukti-bukti yang jelas, pinta Nabi Musa.¹²⁹

Potongan ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindunginya dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Nabi Musa menganggap Nabi Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

Petunjuk *syara'* lain, yang menjadi petunjuk secara tidak langsung adalah Firman Allah SWT:

¹²⁹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Jilid 4*, diterjemahkan oleh K.H. Yasin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011, h. 32-33.

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ٢٩ هَارُونَ أَخِي ٣٠ أَشْدُدْ بِهٖ
أَزْرِي ٣١ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ٣٢¹³⁰

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku (yaitu) Harun, saudaraku teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.¹³¹

Kata *al-Wazīr* adalah *al-Muwāzīr* (yang menanggung beban), seperti *al-Akīlu* dan *al-Muwākīl*, karena ia orang yang ikut menanggung beban sultan atau penguasa. Az-Zajjaj mengatakan bahwa *al-wazīr* adalah orang yang pendapatnya menjadi andalan raja dalam berbagai urusan, sehingga merujuk kepadanya. Kemudian al-Ashmai mengatakan bahwa kata tersebut dibentuk dari *al-Muwāzarah* yakni *al-Mu'āwanuh* (kerjasama; saling membantu; saling menolong). Sedangkan kata *lī* terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni *kāinan lī*. Adapun kalimat *min ahlī* sebagai sifat *wazīran* dan *akhī* sebagai pengganti dari kata *hārun*. Pada kalimat *asydud bihī 'azrī* dan *wa 'asyrikhū fī 'amrī*, jumbuh membaca kata *asydud* dengan hamzah qath'i. Keduanya dalam bentuk doa, yakni wahai Tuhanku teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan jadikanlah dia sekutuku dalam urusan misi ini.¹³²

Sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka segala bentuk bantuan hukum dari seorang advokat

¹³⁰ Thaha [20]: 29-32

¹³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 313.

¹³² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 7*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 177-178.

kepada masyarakat (klien) merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong. Sebab pada faktanya salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap hukum. Sehingga dengan menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan akan sangat membantu masyarakat dalam rangka mencari keadilan.

Selain itu, dalil yang menjadi petunjuk secara tidak langsung terhadap penggunaan jasa advokat ini adalah hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila suatu amanah di sia-siakan maka tunggulah akan kehancurannya.” Sahabat bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (H.R. Bukhari)¹³³

¹³³ Hadis nomor 6015 lihat Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam IAIN Ternate Vol. XIV, No. 1, 2014, h. 116 Lihat juga sumber aslinya Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Al-Jâmi’ al-Shahîh*, Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M., Cet. III, Jilid I, h. 33.

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara akan tetapi ia tidak berkompeten dalam perkara tersebut, maka tunggulah akan kegagalannya. Jika seseorang mempunyai permasalahan hukum yang ia tidak memahami dan mengerti bagaimana untuk menyelesaikannya, maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat untuk berkonsultasi ataupun sebagai kuasa hukumnya. Seringkali masyarakat tidak mengetahui jika kasus hukum yang menyimpannya diperlukan pendampingan dan arahan dari seseorang yang paham akan hukum guna membantunya dalam memecahkan masalah tersebut. karena ditakutkan jika tidak ditangani oleh orang yang ahli dibidang hukum maka kasus tersebut akan menjadi semakin rumit.

d. Penggunaan jasa advokat dilihat dari ketentuan atau syarat *maṣlahah*

Setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya mengandung unsur *maṣlahah*. *Maṣlahah* berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta.¹³⁴ Namun, tidak semua *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sehingga ada beberapa

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 64.

ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah.

Untuk melihat apakah kemaslahatan yang terkandung dalam penggunaan jasa advokat ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemaslahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah*?. Berikut adalah syarat-syarat *maṣlahah*, diantaranya:¹³⁵

1) *Maṣlahah* harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹³⁶ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.¹³⁷ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ia mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatan itu bersifat pasti, sebab benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, yakni sebagai bentuk tolong menolong dalam

¹³⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 137-138.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 137.

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 359.

menyelesaikan permasalahan hukum. Tak kalah penting manfaat-manfaat tersebut dapat diterima secara rasional.

2) *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak terhadap penggunaan jasa advokat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AH¹³⁸, bahwa kehadiran seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum bagi klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan Pengadilan Agama maupun di masyarakat. AH juga menambahkan bahwa banyak manfaat yang dirasakan dalam penggunaan jasa advokat, diantaranya: mempermudah tanya jawab dalam persidangan, memperlancar proses beracara dan

¹³⁸ AH merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Informan kelahiran Marabahan, 06 Agustus 1966 ini adalah lulusan Magister Hukum. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Maret 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 13:50-14:20 WIB.

lainnya. Bahkan manfaat tersebut juga dirasakan oleh panitera pengganti, seperti mempermudah panitera pengganti untuk membuat BAP.¹³⁹

- 3) *Maṣlahah* harus sejalan dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *syara'*

Kemaslahatan penggunaan jasa advokat ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka ia tidak bertentangan dengan *syara'*. Sebab terkait dengan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, peneliti tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan *syara'* dalam konteks kemashlahatan terhadap penggunaan jasa advokat di Pengadilan. Pada faktanya, semua pihak yang terkait dalam penggunaan jasa advokat turut mengapresiasi karena dapat memberikan nilai kebaikan.

Jika penggunaan jasa advokat ditinjau secara syari'at Islam, maka terdapat 3 (tiga) nilai atau prinsip yang terkandung di dalam penggunaan jasa advokat tersebut, yakni:

- a) Prinsip tolong-menolong

Prinsip ini dapat diaplikasikan dalam penggunaan jasa advokat di Pengadilan. Selain itu, prinsip ini juga dapat dijalankan oleh seorang advokat untuk memberikan jasa

¹³⁹ *Ibid.*

hukum berupa bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Berdasarkan prinsip ini, setiap advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien tidak didasarkan pada tujuan materiil seperti patokan atau standar upah (*honorarium*) yang bisa memberatkan klien. Tarif jasa advokat bisa diterima sepanjang dalam batas yang wajar dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yakni klien dan advokat.

b) Prinsip perdamaian

Prinsip perdamaian bisa diartikan sebagai bentuk negosiasi atau mediasi. Prinsip ini mengupayakan sebuah perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai dalam persidangan. Sehingga akan tercipta sebuah harmonisasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada bab III tentang Hubungan dengan klien dalam pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa setiap advokat jika menangani kasus atau perkara perdata maka harus lebih mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.¹⁴⁰

Ajaran Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu memiliki rasa perdamaian yang tinggi dan disuruh untuk menjauhi segala macam bentuk pertikaian,

¹⁴⁰ Lihat Kode Etik Advokat Indonesia pada Bab III Tentang Hubungan Dengan Klien dalam Pasal 4 huruf a.

perselisihan, dan permusuhan antar sesama. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤¹⁴¹

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹⁴²

Pada kalimat *lā khaira fī katsirīm min najwāhum* Allah SWT menjelaskan bahwa kebanyakan bisikan orang-orang di antara mereka itu tidaklah membawa kepada kebaikan. Dalam ayat lain, Allah SWT justru melarang melakukan bisikan yang tidak membawa kebaikan. Lebih lanjut, Allah SWT menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari amalan syaitan agar orang-orang mukmin merasa khawatir dan takut.¹⁴³

Sedangkan dalam kalimat *iṣlāhim bainan nās* Allah SWT tidak menjelaskan apakah maksud dari “di antara manusia” adalah kaum muslimin dan bukan kaum kafir atau tidak demikian. namun, pada ayat lain Allah SWT

¹⁴¹ An-Nisā [4]: 114.

¹⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 97.

¹⁴³ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan Jilid 1*, diterjemahkan oleh Fathuraji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 818.

menjelaskan bahwa maksud dari manusia yang berdamai disini ialah kaum muslimin.¹⁴⁴ Sebagaimana ayat al-Qur'an berikut ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠¹⁴⁵

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁴⁶

Dengan hanya menyebut kaum mukminin secara khusus, maka hal itu menunjukkan tidak demikian bagi mereka selain kaum mukmin.¹⁴⁷ Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ¹⁴⁸

Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu.¹⁴⁹

Perdamaian juga salah satu perintah yang dianjurkan bahkan diharuskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَتِهِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 819.

¹⁴⁵ Q.S. Al-Hujurat [49]: 10.

¹⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 456.

¹⁴⁷ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul...*, h. 819.

¹⁴⁸ Q.S. Al-Anfal [8]: 1.

¹⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 248.

Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, “Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?” Para sahabat berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah bersabda, “Mendamaikan orang yang berselisih. Rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas.”¹⁵⁰

Sehingga dalam prinsip perdamaian ini maka keterkaitannya dalam penggunaan jasa advokat mengandung kemashlahatan dan sesuai dengan syarat dari *maṣlahah* yang mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan *syara*’.

c) Prinsip *amānāt*

Prinsip *amānāt* merupakan suatu sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain.¹⁵¹

Dalam konteks ini, jika masyarakat menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan, maka advokat dituntut untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, kepercayaan atau *amānāt* tersebut harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat al-Qur’an berikut ini:

¹⁵⁰ Hadis nomor 4919 lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku Ke-3)* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, H. 351-352.

¹⁵¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia...*, h. 235.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾¹⁵²

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵³

Maksud dari kalimat *innallaha ya' muru kum 'an tu'addul 'amānāti* ialah kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang. Sedangkan kalimat *ilā 'ahlihā* ialah kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya pada kalimat *wa izā hakamtum bainan nāsi* (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah SWT menitahkanmu: *'an tahkumū bil'adli, innallaha ni'immā* (agar menetapkan hukum dengan adil, sesungguhnya Allah amat baik sekali). Kemudian pada ayat *ya'izukum bihī* (nasehat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanah dan menjatuhkan putusan secara adil. Pada ayat *innallaha kāna samī'ān* (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan. Di akhiri

¹⁵² An-Nisā [4]: 58.

¹⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 87.

dengan kalimat *baṣīrān* (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.¹⁵⁴

Terkait penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan, maka advokat yang diberi *amānāt* sebagai kuasa hukum klien dalam persidangan di perintah oleh Allah SWT untuk selalu berlaku *amānāt* dan adil dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Sebab, semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Akhinya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tersebut berkesesuaian dengan syarat-syarat dari *maṣlahah* dan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari *maṣlahah* maka penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sudah mencakup makna kemaslahatan sebab ia mengandung nilai manfaat yang dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan penggunaan jasa advokat ini juga termasuk kepada *maṣlahah mu'tabarah* dikarenakan ada dalil *syara'* yang secara tidak langsung keterkaitan dengannya. Kemaslahatan

¹⁵⁴ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul Ayat Jilid 1*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996, h. 337.

penggunaan jasa advokat ini juga telah memenuhi beberapa syarat *maṣlahah* sehingga penggunaan jasa advokat ini mengandung unsur *maṣlahah* yang sesuai dengan *syara'* dan hukum Islam.

2. Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu berfungsi pula untuk menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Jika dikaitkan dengan penggunaan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, maka dalam penggunaan jasa advokat tersebut terdapat sebuah perlindungan hukum. Implikasinya dari penggunaan jasa advokat jika dipandang dari sudut perlindungan hukum, maka masyarakat yang menggunakan jasa advokat dalam perkara akan terlindungi hak-haknya di depan hukum. Lebih dari itu, masyarakat akan merasa terjamin dari segi hukum disebabkan adanya advokat yang

bertindak sebagai kuasa atau wakilnya di persidangan yang mana advokat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak kliennya. Seorang advokat tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menyesatkan klien. Sebagaimana yang terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada pasal 4 huruf b yakni advokat tidak diperkenankan memberikan keterangan yang bisa mengelabui atau merugikan klien terkait perkara yang dijalaninya.

Selain itu, peranan advokat sangat besar bagi masyarakat dan negara. Tidak saja karena ia dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga karena advokat adalah salah satu potensi kekuatan dalam masyarakat dan negara untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia. Tidak sedikit peran para advokat membantu pemerintah. Dengan masyarakat menggunakan jasa advokat, maka kesadaran hukum di masyarakat sudah ditingkatkan. Masyarakat akan semakin paham terkait hak dan kewajibannya. Disamping advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat dan kliennya, juga berfungsi dan berkewajiban untuk berperan dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaruan hukum (*law reform*), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shopping/rechtvorming*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

disamping menjadi pembela ataupun wakil dari klien juga bisa memberikan perlindungan hukum kepada klien. Sehingga hak-hak klien di depan hukum dapat terlindungi dan terjamin dengan kehadiran seorang advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 22 perkara yang menggunakan jasa advokat dari 571 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Dengan demikian, sebanyak 549 perkara yang di dalamnya tidak menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum di persidangan. Pada tahun 2017, jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat sebanyak 23 perkara dari 623 perkara yang terdaftar. Sedangkan 600 perkara sisanya tidak menggunakan jasa advokat. Kemudian pada tahun 2018, sebanyak 427 perkara tidak menggunakan jasa advokat dari 483 perkara yang masuk. Artinya, hanya 56 perkara yang di dalamnya terdapat advokat sebagai kuasa hukum. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak menggunakan jasa advokat lebih besar daripada jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat. Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya antara lain: (a) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum (b) asumsi masyarakat terhadap besarnya honorarium advokat (c) padatnya aktivitas para pihak. Dengan demikian, setiap tahunnya selalu ada pengguna jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

2. Implikasi dari penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya antara lain: lebih praktis bagi klien dari segi waktu, terhindar dari kesalahan dalam membuat berbagai macam dokumen atau surat yang berkaitan dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, klien dapat memahami hak-haknya, mempermudah hakim dalam sesi tanya jawab, dapat mempermudah panitera dalam hal mengurus administrasi serta prosedur berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, dan dapat mewakili para pihak yang tidak bisa hadir dalam proses persidangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, maka Peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di Pengadilan namun terkendala akan biaya. Maka bisa menggunakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain melalui LBH, seseorang yang terlilit kasus hukum juga bisa berkonsultasi dengan meminta bantuan seorang advokat untuk memberikan pendapat hukumnya terkait perkara yang sedang dihadapi. Cara seperti ini relatif dapat menekan biaya bagi yang tidak mampu

menggunakan jasa advokat. Disamping itu, hal tersebut juga dapat memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dalam menghadapi proses persidangan di pengadilan. Untuk advokat hendaknya kembali mensosialisasikan profesi advokat kepada masyarakat, seperti mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi publik terkait dengan profesi advokat. Khususnya, untuk masyarakat kelas menengah kebawah. Dikarenakan, sepanjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui profesi advokat. Hal ini akan mempengaruhi terhadap penggunaan jasa advokat sendiri.

2. Agar manfaat dari penggunaan jasa advokat dapat dirasakan oleh seluruh pihak maka advokat sebagai kuasa hukum dari klien haruslah bertanggung jawab penuh, amanah, dan berlaku adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik dan sumpah profesinya. Sebab penggunaan jasa advokat ini sudah banyak mengandung kemaslahatan, apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang advokat tidak bisa melaksanakan dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya maka tidak sempurnalah kemaslahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku Ke-3)* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram: Hadis Hukum-Hukum Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Surun, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Palangka Raya: CV. Putra Azka Pratama, 2017.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2015, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.
- Dzajuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Faisal, Sunafiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Fidel, *Review Ujian Advokat*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010.

- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hadjon, M. Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Ilmar, Aminudin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 7*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul Ayat Jilid 1*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam (Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Lingkungan Pengadilan)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mahfud Md, Moh., *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Molleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

- Mujahidin, Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rambe, Ropuan, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial & Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak, 1999.
- Silaban, Sintong *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan Jilid 1*, diterjemahkan oleh Fathuraji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Jilid 4*, diterjemahkan oleh K.H. Yasin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

———, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

———, *Restorative Justice (Hukum masyarakat nelayan saka dalam sistem hukum nasional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

C. Karya Ilmiah

Fathoni, Ahmad, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, SKRIPSI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015.

Gofar, Abdullah, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 61 Tahun XIV Edisi Mei-Juni 2003, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2003.

Kurniawan, M. Johan, *Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

- Rada, Arifin *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam IAIN Ternate Vol. XIV, No. 1, 2014.
- Rosyadi, Imron, *Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan*, SUHUF, Vol. 25, No. 1, Mei 2013.
- Tarantang, Jefry, *Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, TESIS, Pascasarjana Magister Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2017.
- Usodo, Sadewo, *Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XVIII, No. 1 Januari 2013.

D. Internet

- <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1> (online Selasa, 12 Februari 2019)
- Prawira, Adam, <https://nasional.sindonews.com/read/1312137/13/bentuk-advokat-muda-peradi-pacu-kualitas-penegakan-hukum-1528284488>, (online Rabu, 13 Februari 2019).
- Profil Pengadilan Agama kota Palangka Raya, [Httts://pa-palangkaraya.go.id](https://pa-palangkaraya.go.id), (online Selasa, 12 Maret 2019).